

**ANALISIS YANG MEMPENGARUHI INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM) DI INDONESIA PADA
TAHUN 2015-2024**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nama : Jessica Narulita Marbun
NPM : 2305180043P
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : JESSICA NARULITA MARBUN
NPM : 23051800432
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS YANG MEMPENGARUHI INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM) DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-
2024

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Andi Prayogi, S.E., M.Si

Dr. Sylvia Vianty Ranita, S.E., M.Si

Pembimbing

Dra. Rosnata Hafni, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Radiman, S.E., M.Si

Sekretaris



Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : JESSICA NARULITA MARBUN
N.P.M : 2305180043P
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS YANG MEMPENGARUHI INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM) DI INDONESIA PADA TAHUN
2015-2024

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
Tugas Akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Skripsi

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ANDI PRAYOGI, SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. RADIMAN, S.E., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Jessica Narulita Marbun
NPM : 2305180043P
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : Dra. Roswita Hafni, M.Si.
Judul Penelitian : Analisis yang Mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada Tahun 2015-2024

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas Akhir	Paraf	Keterangan
23/11-2025	Acc Bab I, II & III. Fokus ke Daftar pustaka.		
23/1-2026	Ambil Dik.		
12/2-2026	Olak Dik. Acam Diskripsi.		
15/2-2026	Uraikan - Analisa secara Diskripsi + Data Sekunder di Kariri		
1/3-2026	- Analisa Dik. & Views. - Uji Asumsi Klasik. - Model Regresi linier Berganda. - Analisa Uji t-tes		
14/3-2026	- Perbaikan Ulang / Perbaikan I, II, III dik. - Daftar Pustaka : → Mendekup. - Uraikan Uraian		
30/3-2026	Acc Daftar Sediaan Tugas Akhir		

Diketahui oleh:
Dosen Pembimbing

Dra. Roswita Hafni, M.Si

Medan, 15 April 2026
Disetujui oleh:
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Andi Prayogi, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : JESSICA NARULITA MARBUN

N.P.M : 2305180043P

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat : JL. SAPTA MARGA TENGAH NO.K-

177,KEL.TANJUNG REJO,KEC.MEDAN SUNGGAL.

Judul Tugas Akhir :ANALISIS YANG MEMPENGARUHI INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM) DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-
2024

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri., kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



JESSICA NARULITA MARBUN

ABSTRAK

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketimpangan pembangunan desa di Indonesia yang tercermin dari dominasi status desa berkembang serta masih adanya desa tertinggal dan sangat tertinggal. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan berbagai instrumen fiskal seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), peningkatan status desa belum merata secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia selama periode 2015–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan variabel dependen adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia. Secara parsial, Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IDM, karena berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa juga berpengaruh positif dalam memperkuat kelembagaan dan pelayanan publik desa. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus berperan sebagai pendukung pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dan layanan dasar di daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal desa memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan status desa dari tertinggal menjadi berkembang, maju, hingga mandiri. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan dana serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Indeks Desa Membangun, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Persistent disparities in rural development remain a critical issue in Indonesia, as indicated by the predominance of developing villages alongside the continued presence of underdeveloped and severely underdeveloped villages. Despite the government's substantial fiscal interventions through Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), and Special Allocation Funds (DAK), improvements in village status have not been evenly achieved. This study aims to examine the extent to which these fiscal instruments influence the Village Development Index (IDM) in Indonesia over the 2015–2024 period. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The study utilizes secondary data obtained from official sources, including the Central Bureau of Statistics (BPS), the Ministry of Villages, and the Ministry of Finance. The independent variables consist of Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), and Special Allocation Funds (DAK), while the dependent variable is the Village Development Index (IDM). The findings indicate that, collectively, DD, ADD, and DAK exert a significant influence on the Village Development Index. Individually, Village Funds demonstrate a positive and statistically significant effect on improving IDM, primarily due to their direct role in financing rural infrastructure development and community empowerment initiatives. Village Fund Allocation also shows a positive contribution by enhancing institutional capacity and the provision of public services at the village level. Meanwhile, Special Allocation Funds function as a complementary instrument that supports regional development through improvements in infrastructure and basic public services. These results underscore the importance of fiscal decentralization policies in accelerating rural transformation and upgrading village status from underdeveloped to developing, advanced, and ultimately self-sufficient categories. Accordingly, strengthening fund management practices and improving the administrative capacity of village institutions are essential to ensure more effective and sustainable rural development outcomes.

Keywords: Village Development Index, Village Funds, Fiscal Decentralization, Rural Development, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Desa Membangun Di Indonesia Pada Tahun 2015-2024”**. Semoga senantiasa tercurah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan tugas akhir ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orangtua saya yaitu bapak dan mama saya terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Radiman, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si., selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc., selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Andi Prayogi, S.E., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi dan support yang sangat berharga Bapak berikan, selama proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Ibu Dr. Sylvia Vianty Ranita, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Roswita Hafni, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang sangat berharga Ibu berikan kepada saya, selama proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Bapak Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima
11. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
12. Bapak/Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
13. Kepada adik- adik saya yang telah memberi semangat dan meyakinkan penulis bisa selesai menulis tugas akhir ini.
14. Kepada teman-teman dekat saya yang telah memberi semangat dan memberikan informasi kepada saya.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih,

Medan, April 2026

Penulis

Jessica Narulita Marbun

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	26
1.3 Batasan Masalah.....	27
1.4 Rumusan Masalah	27
1.5 Tujuan Penelitian.....	27
1.6 Manfaat Penelitian.....	28
BAB 2	29
KAJIAN PUSTAKA	29
2.1 Landasan Teori	29
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual	51
2.3 Hipotesis Penelitian	52
2.4 Kerangka Penelitian	60
2.5 Model Kerangka Teoritis Model Analisis Yang Mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM)	61
2.6 Hipotesis	61
BAB 3	63
METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Jenis Penelitian	63
3.2 Definisi Operasional	63
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	66
3.4 Jenis dan Sumber Data	66

3.5 Teknik Pengumpulan Data	67
3.6 Teknik Analisis Data	67
BAB 4	77
HASIL DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Hasil Penelitian	77
4.2 Pembahasan	122
BAB 5	130
PENUTUP	130
5.2 Kesimpulan	130
5.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2015-2024	1
Tabel 1. 2 Data Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2024	4
Tabel 1. 3 Data Indeks Desa Membangun di Indonesia Tahun 2015-2024	8
Tabel 1. 4 Data Dana Desa (DD),Alokasi Dana Desa(ADD), Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia tahun 2015-2024.....	13
Tabel 1. 5 Dana Desa/DD (satuan triliun rupiah) pada tahun 2015-2024 di 34 Provinsi di Indonesia.....	14
Tabel 1. 6 Alokasi Dana Desa di 34 provinsi di Indonesia patahun 2015-2024....	18
Tabel 1. 7 Dana Alokasi Khusus/DAK di 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2024.....	21
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	65
Tabel 4.1 Indeks Desa Membangun di Indonesia Tahun 2015–2024 (Jumlah Desa).....	78
Tabel 4. 2 Indeks Desa Membangun (IDM) Menurut Dana Desa (DD) di Indonesia Tahun 2015–2024	80
Tabel 4. 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia Tahun 2015–2024.....	86
Tabel 4. 4 Indeks Desa Membangun (IDM) menurut Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia Tahun 2015–2024	89
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif	100
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas	104
Tabel 4. 7 Uji Hetrokedastisitas dengan Uji White	105
Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi.....	107
Tabel 4. 9 Hasil Regresi	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	51
Gambar 2. 2 Bagan Konseptual Model	60
Gambar 2. 3 Kerangka Teoritis Model Ekonometrika.....	61
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	103
Gambar 4. 2 Kurva Dana Desa	114
Gambar 4. 3 Kurva Alokasi Dana Desa (ADD).....	116
Gambar 4. 4 Kurva Dana Alokasi Khusus (DAK).....	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Indeks Desa Membangun (IDM) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024	77
Lampiran 2. Data Realisasi Dana Desa (DD) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024	79
Lampiran 3. Data Alokasi Dana Desa (ADD) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024	85
Lampiran 4. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Desa Tahun 2015-2024.....	88
Lampiran 5. Hasil Olah Data Eviews: Uji Asumsi Klasik.....	101
Lampiran 6. Hasil Olah Data EViews: Analisis Regresi Linear Berganda.....	107
Lampiran 7. Hasil OLah Data EViews: Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F)	113
Lampiran 8. Hasil Olah Data Eviews: Koefisien Determinasi(R^2).....	119

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Indonesia masih mengalami tahap atau proses untuk membangun perekonomian yang lebih baik guna menciptakan perekonomian yang inklusif (Todaro & Smith, 2013). Pembangunan nasional juga bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses Pembangunan nasional di Indonesia tentunya bukan proses yang instan, diperlukan kesinambungan antara kebijakan ekonomi dan indikator perubahan sosial ekonomi menuju arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Solechah & Yogyakarta, 2023). Tidak hanya itu pembangunan nasional berhasil atau tidaknya dapat tercermin dari adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2015-2024

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Catatan Konteks
2015	4,88%	Melambat akibat penurunan harga komoditas global dan transisi kebijakan pemerintah baru.
2016	5,03%	Mulai stabil, didorong oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang terjaga.
2017	5,07%	Pertumbuhan positif didukung oleh perbaikan kinerja ekspor dan investasi infrastruktur.
2018	5,17%	Capaian tertinggi sebelum pandemi, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat selama tahun politik.

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Catatan Konteks
2019	5,02%	Stabil sebelum pandemi, ditopang konsumsi domestik dan investasi.
2020	-2,07%	Kontraksi akibat pandemi COVID-19, pertama kali sejak krisis moneter 1998.
2021	3,70%	Pemulihan awal, didorong oleh <i>rebound</i> ekspor komoditas dan pelonggaran mobilitas masyarakat.
2022	5,31%	Pertumbuhan kuat, tertinggi pasca-pandemi, ditopang harga komoditas global (boom komoditas).
2023	5,05%	Pertumbuhan moderat, konsumsi tetap solid meski kinerja ekspor mulai melemah seiring normalisasi harga.
2024	5,03%	Stabil, PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139 triliun, PDB per kapita Rp78,6 juta (USD 4.960).

Sumber : BPS, <https://www.bps.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2019 perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang stabil dengan pertumbuhan mencapai 5,02%. Namun stabilitas ini terhenti drastic pada tahun 2020 akibat guncangan global pandemi Covid-19, dimana pertumbuhan anjlok ke angka negatif -2,07%. Hal ini mencerminkan kontraksi ekonomi pertama Indonesia sejak krisis moneter tahun 1998, yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas, penurunan konsumsi, dan gangguan rantai pasok.

Perekonomian kemudian memasuki fase pemulihan yang kuat pada tahun 2021, pertumbuhan melonjak menjadi 3,7% seiring dengan pelonggaran pembatasan dan adaptasi masyarakat. Momentum pemulihan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,31%. Capaian ini

didorong oleh *rebound* konsumsi domestik yang masif dan lonjakan harga komoditas global yang menguntungkan ekspor Indonesia. Setelah mencapai puncak pemulihan, pertumbuhan cenderung stabil kembali di level 5%. Pada tahun 2023, ekonomi tumbuh sebesar 5,05%. Angka ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan tingginya suku bunga. Tren stabilitas diproyeksikan berlanjut hingga tahun 2024 dengan angka pertumbuhan di level 5,03%, yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik dan pengeluaran terkait Pemilihan Umum (Pemilu) di awal tahun.

Berikut grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015-2024 dijelaskan pada gambar 1.1:



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), data diolah

Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi setiap tahunnya tidak lepas dari adanya pengaruh pembangunan desa (Rattu & Tulusan, 2022). Pembangunan desa memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang nantinya berdampak terhadap pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Adanya pembangunan desa sebagai bentuk upaya

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terutama dari segi akumulasi modal dan kekayaan suatu negara (Benita et al., 2023). Oleh sebab itu, pembangunan desa harus dibagi merata kepada seluruh rakyat secara adil sebagai wujud peningkatan kesejahteraan.

Kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan desa yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kemandirian desa melalui tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa dengan skor IDM rendah biasanya menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peluang ekonomi, sehingga kemiskinan cenderung bertahan dan bahkan menurun secara lambat. Sebaliknya, peningkatan skor IDM melalui intervensi kebijakan fiskal mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan, karena pembangunan desa yang lebih merata membuka kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Tabel 1. 2 Data Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2024

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	16.9	16.4	15.9	15.3	15.0	15.4	15.3	14.8	14.1	13.6
Sumatera Utara	9.8	9.4	9.2	8.8	8.7	8.8	8.7	8.4	7.9	7.3
Sumatera Barat	7.8	7.6	7.4	6.9	6.6	6.8	6.6	6.2	5.8	5.3
Riau	8.8	8.4	8.0	7.6	7.2	7.4	7.3	6.9	6.6	6.1
Jambi	8.8	8.4	8.1	7.7	7.4	7.6	7.5	7.2	6.9	6.9
Sumatera Selatan	13.8	13.4	13.0	12.6	12.2	12.6	12.3	11.9	10.6	10.1
Bengkulu	17.1	16.6	16.0	15.4	14.8	14.6	14.0	13.3	12.6	12.0

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung	14.8	14.4	14.0	13.6	13.2	13.6	13.0	11.8	10.6	10.0
Kep. Bangka Belitung	6.8	6.4	6.1	5.7	5.4	5.6	5.1	5.0	4.9	4.7
Kep. Riau	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4	6.6	6.1	5.9	4.9	4.4
DKI Jakarta	4.8	4.4	4.1	4.0	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
Jawa Barat	9.8	9.4	9.1	8.7	8.4	8.6	8.1	7.6	7.1	7.0
Jawa Tengah	13.8	13.4	13.0	12.6	12.2	12.6	12.0	10.8	10.1	9.4
DI Yogyakarta	14.8	14.4	14.0	13.6	13.2	13.6	13.0	11.8	10.6	10.2
Jawa Timur	13.8	13.4	13.0	12.6	12.2	12.6	12.0	10.8	10.1	9.5
Banten	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4	6.6	6.1	5.9	5.6	5.5
Bali	5.8	5.4	5.1	4.7	4.4	4.6	4.1	3.9	3.7	3.4
Nusa Tenggara Barat	16.8	16.4	16.0	15.6	15.2	15.6	15.0	13.9	12.6	11.7
Nusa Tenggara Timur	23.8	23.4	22.9	22.6	22.2	22.7	22.0	21.0	19.6	18.6
Kalimantan Barat	8.8	8.4	8.0	7.6	7.2	7.6	7.1	6.9	6.6	6.1
Kalimantan Tengah	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4	6.6	6.1	6.6	5.6	5.1
Kalimantan Selatan	6.8	6.4	6.1	5.7	5.4	5.6	5.1	5.6	4.1	3.8
Kalimantan Timur	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4	6.6	6.1	5.9	5.6	5.1
Kalimantan Utara	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4	6.6	6.1	5.9	5.6	5.5
Sulawesi Utara	9.8	9.4	9.1	8.7	8.4	8.6	8.1	7.6	7.1	6.7
Sulawesi Tengah	13.8	13.4	13.0	12.6	12.2	12.6	11.98	11.0	10.6	10.5
Sulawesi Selatan	10.8	10.4	10.0	9.6	9.2	9.6	9.1	9.1	8.1	7.6

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Tenggara	13.8	13.4	13.0	12.6	12.2	12.6	11.98	11.0	10.6	10.5
Gorontalo	17.8	17.4	17.0	16.6	16.2	16.6	15.0	16.6	15.0	14.0
Sulawesi Barat	12.8	12.4	12.0	11.6	11.2	11.6	11.0	11.6	10.2	9.8
Maluku	19.8	19.4	19.0	18.6	18.2	18.6	17.2	18.6	17.2	16.0
Maluku Utara	8.8	8.4	8.0	7.6	7.2	7.6	6.9	7.6	6.9	6.5
Papua	28.8	28.4	28.0	27.6	27.2	27.6	25.8	27.6	25.8	24.0
Papua Barat	25.8	25.4	25.0	24.6	24.2	24.6	22.8	24.6	22.8	21.0

Sumber : BPS, <https://www.bps.go.id/>

Pada pola wilayah Tabel 1.2, menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di hampir semua provinsi antara 2015 dan 2024, meskipun laju penurunan berbeda antarwilayah. Provinsi di Jawa dan Bali umumnya mencapai angka kemiskinan rendah (sekitar 3–9% pada tahun 2024), sedangkan Papua, Papua Barat, dan NTT tetap mencatat angka tinggi meskipun menurun (masih di atas 18–24% pada 2024). Tren ini konsisten dengan publikasi BPS yang menampilkan disparitas regional dalam penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan desa (DD, ADD, DAK) dan IDM Penurunan kemiskinan di banyak provinsi berkaitan dengan intervensi fiskal desa sejak 2015, khususnya Dana Desa (DD) untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, ADD untuk operasional dan tata kelola desa, serta DAK untuk layanan sektor prioritas. Perbaikan akses infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang didanai instrumen ini berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dan membuka peluang ekonomi lokal sehingga menekan kemiskinan. Namun efektivitasnya lebih terbatas di daerah terpencil karena hambatan geografis dan kapasitas kelembagaan lokal.

Implikasi kebijakan untuk mempercepat penurunan kemiskinan di

provinsi tertinggal diperlukan penajaman alokasi DAK yang pro-layanan dasar, peningkatan kapasitas pengelolaan DD/ADD di tingkat desa, serta program terintegrasi yang mengatasi hambatan logistik dan SDM. Fokus pada peningkatan IDM di desa-desa paling tertinggal akan memperkecil disparitas antarprovinsi dan mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan nasional.

Dalam periode 2015–2024, pemerintah Indonesia mengalokasikan berbagai instrumen fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan desa, yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Desa yang mulai digulirkan pada 2015 menjadi motor utama pembangunan desa, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Peningkatan akses infrastruktur ini secara langsung berkontribusi terhadap dimensi ekonomi IDM, yang kemudian menurunkan tingkat kemiskinan di desa tertinggal. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota berfungsi memperkuat kapasitas kelembagaan desa, mendukung operasional pemerintahan desa, dan membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat. ADD berperan penting dalam memperbaiki tata kelola desa, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. DAK berkontribusi pada dimensi sosial dan ekologi IDM, misalnya melalui pembangunan sekolah, puskesmas, sarana air bersih, serta program lingkungan berkelanjutan.

Ketiga instrumen fiskal ini saling melengkapi dalam mendorong peningkatan IDM dan penurunan kemiskinan. Dana Desa memperkuat dimensi

ekonomi dengan membuka akses pasar dan meningkatkan produktivitas masyarakat, ADD memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang mendukung partisipasi masyarakat, sementara DAK menutup kesenjangan layanan dasar yang menjadi prasyarat peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, kebijakan fiskal desa pada periode 2015–2024 tidak hanya meningkatkan skor IDM, tetapi juga menjadi strategi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di desa, sekaligus mempercepat pencapaian pembangunan nasional berbasis pemerataan dan keadilan sosial.

Berdasarkan data Kementerian Desa indeks desa membangun di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2024 mengalami gejolak dan masih didominasi oleh desa dengan kategori berkembang.

Tabel 1. 3 Data Indeks Desa Membangun di Indonesia Tahun 2015-2024

Status Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	2.894	4.000	5.000	5.606	848	1.741	3.269	6.238	11.456	17.203
Maju	13.453	16.000	17.000	18.000	8.608	9.071	15.321	20.249	23.035	23.063
Berkembang	52.000	51.000	50.000	55.369	38.276	38.083	38.083	33.902	28.766	24.532
Tertinggal	17.000	16.500	15.000	14.461	17.633	19.145	12.635	9.584	7.154	6.100
Sangat Tertinggal	9.000	8.500	7.500	7.000	6.549	6.220	5.649	4.982	4.850	4.363
Total Desa	71.347	72.000	72.500	74.436	71.914	74.260	74.957	74.955	75.261	75.261

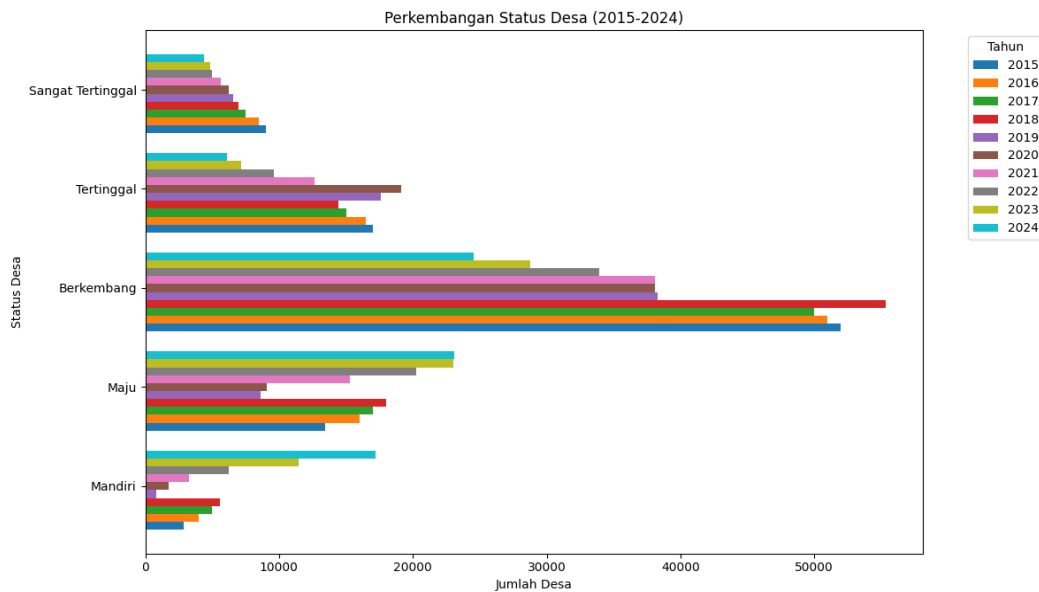
Sumber : Kementerian Desa, <https://satudata.kemendes.go.id/>

Transformasi desa mandiri dan pencapaian target nasional pertumbuhan jumlah Desa Mandiri dari 848 desa pada 2019 menjadi 17.203 desa pada 2024 menunjukkan keberhasilan kebijakan fiskal desa. Lonjakan ini sejalan dengan target RPJMN 2015-2024 yang menekankan penguatan kemandirian desa melalui

Dana Desa. Menurut Abdul Halim Iskandar dalam laporan *Indeks Desa Membangun 2024*, peningkatan status desa terjadi karena adanya penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan ekologi desa sehingga mampu mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal desa berhasil mendorong transformasi struktural di tingkat lokal.

Efektivitas Dana Desa dalam Mengurangi Ketertinggalan penurunan jumlah Desa Tertinggal dari 17.633 (2019) menjadi 6.100 (2024), serta Desa Sangat Tertinggal dari 6.549 menjadi 4.363, menunjukkan efektivitas Dana Desa dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. Dalam buku *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (Kemenkeu RI, 2022), dijelaskan bahwa perubahan status desa merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dialokasikan berbasis kebutuhan dan kinerja terbukti mempercepat konvergensi pembangunan antarwilayah, sehingga desa tertinggal dapat naik kelas menjadi berkembang atau maju.

Berikut grafik IDM di Indonesia pada tahun 2015-2024, digambarkan pada Gambar 1.2:



Gambar 1. 2 Indeks Desa Membangun di Indonesia

Sumber: Kementerian Desa (2025), data diolah

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa indeks desa membangun di Indonesia masih didominasi oleh desa berkembang, walaupun secara tren desa mandiri dan desa maju meningkat. Adanya desa dengan kategori berkembang yang cukup banyak dibandingkan dengan kategori lain, membuat pemerintah harus lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan indeks desa membangun agar status desa berkembang dapat dihilangkan sehingga masyarakat desa juga ikut sejahtera. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks desa membangun yakni kebijakan dana desa yang meliputi dana desa, alokasi dana desa, dan dana alokasi khusus.

Faktor yang pertama yakni, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dengan tujuan utama mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa

(Halim & Taryani, 2023). Kebijakan ini merupakan instrumen fiskal utama pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mendorong otonomi desa. Terdapat hubungan kausalitas yang erat antara Dana Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM), di mana pemanfaatan Dana Desa di sektor-sektor prioritas (seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pengembangan BUM Desa) secara langsung dimaksudkan untuk meningkatkan nilai komponen IDM (Anggapratama et al., 2023). Dengan demikian, Dana Desa berfungsi sebagai investasi modal untuk mendongkrak status desa dari kategori Tertinggal menjadi Berkembang atau Mandiri, yang secara keseluruhan menggambarkan kemajuan desa dalam dimensi Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi.

Faktor yang kedua yakni, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diperoleh desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, berbeda dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan secara spesifik diatur penggunaannya untuk mendukung operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat (Mone et al., 2024). Keterkaitan ADD dengan Indeks Desa Membangun (IDM) berpusat pada dimensi Ketahanan Sosial, khususnya pada indikator Pelayanan Dasar dan Kelembagaan Desa. Penggunaan ADD yang efektif memastikan stabilitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas tata kelola desa, yang merupakan prasyarat fundamental untuk menggerakkan program pembangunan. Dengan menjamin fungsi administrasi dan pelayanan publik desa berjalan optimal, ADD secara tidak langsung mendukung keberhasilan program yang didanai Dana Desa, memperkuat kapasitas struktural desa, dan pada akhirnya mempercepat peningkatan status desa menuju kategori Maju atau Mandiri dalam klasifikasi IDM.

Faktor yang ketiga yakni, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara spesifik dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai program dan kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dan merupakan urusan daerah (Rezkie & Yunani, 2023). DAK ini terbagi menjadi DAK Fisik (untuk infrastruktur) dan DAK Nonfisik (untuk operasional layanan publik), dan hubungannya dengan Indeks Desa Membangun (IDM) bersifat melengkapi dan strategis, meskipun penyalurannya ditujukan ke daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), bukan langsung ke desa. Implementasi DAK Fisik, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas

sanitasi yang menjangkau desa, secara signifikan meningkatkan dimensi Ketahanan Ekonomi (melalui konektivitas) dan Ketahanan Sosial (melalui akses kesehatan dan pendidikan) dalam IDM. Dengan demikian, DAK berperan sebagai katalisator pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang esensial, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif agar Dana Desa dapat bekerja lebih efektif, dan secara kolektif mendorong peningkatan status IDM dari Tertinggal menuju Maju.

Tabel 1. 4 Data Dana Desa (DD),Alokasi Dana Desa(ADD), Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia tahun 2015-2024

Tahun	Dana Desa (DD) (Triliun Rupiah)	Alokasi Dana Desa (ADD) (Triliun Rupiah)	Dana Alokasi Khusus (DAK) (Triliun Rupiah)
2022	68	34,7	191,1
2023	70	36,9	183,7
2024	71	38	187,6

Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu), <https://djk.kemenkeu.go.id/>

Dana Desa menunjukkan tren peningkatan dari Rp68 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp70 triliun di 2023, dan Rp71 triliun di 2024. Kenaikan ini relatif moderat, mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga alokasi dana untuk pembangunan desa. Fokus utama Dana Desa adalah memperkuat pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta mendukung program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Kenaikan yang stabil ini juga menandakan komitmen pemerintah terhadap agenda pembangunan desa berkelanjutan.

Tabel 1. 5 Dana Desa/DD (satuan triliun rupiah) pada tahun 2015-2024 di 34 Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1,71	3,82	4,89	4,46	4,95	5,04	4,99	4,67	4,76	4,79
2	Sumatera Utara	1,46	3,25	4,15	3,79	4,45	4,54	4,50	4,15	4,45	4,48
3	Sumatera Barat	0,28	0,63	0,81	0,74	0,99	1,01	1,00	0,91	0,97	1,05
4	Riau	0,46	1,03	1,32	1,20	1,45	1,47	1,46	1,32	1,38	1,42
5	Jambi	0,39	0,87	1,11	1,01	1,22	1,24	1,23	1,11	1,16	1,18
6	Sumatera Selatan	0,81	1,81	2,31	2,11	2,51	2,55	2,53	2,28	2,34	2,40
7	Bengkulu	0,34	0,77	0,98	0,89	1,06	1,08	1,07	0,95	0,98	1,00
8	Lampung	0,78	1,74	2,23	2,03	2,42	2,46	2,44	2,19	2,26	2,32
9	Kep. Bangka Belitung	0,10	0,22	0,29	0,26	0,32	0,32	0,32	0,29	0,30	0,30
10	Kepulauan Riau	0,08	0,18	0,23	0,21	0,25	0,25	0,25	0,23	0,24	0,24
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1,59	3,55	4,54	4,14	5,72	5,86	5,86	5,48	5,89	6,05
13	Jawa Tengah	2,23	4,98	6,38	5,82	8,12	8,20	8,12	7,64	7,92	8,11
14	D.I. Yogyakarta	0,12	0,27	0,35	0,32	0,44	0,45	0,44	0,42	0,45	0,46
15	Jawa Timur	2,21	4,93	6,31	5,76	7,44	7,65	7,63	7,15	7,73	7,97
16	Banten	0,35	0,78	1,00	0,91	1,08	1,10	1,09	1,04	1,10	1,14
17	Bali	0,19	0,43	0,55	0,50	0,66	0,67	0,66	0,61	0,67	0,69
18	Nusa Tenggara Barat	0,32	0,72	0,92	0,84	1,10	1,12	1,11	1,04	1,14	1,19
19	Nusa Tenggara Timur	0,81	1,81	2,32	2,12	3,03	3,08	3,05	2,82	2,93	3,02

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kalimantan Barat	0,53	1,19	1,53	1,40	1,83	1,87	1,86	1,70	1,76	1,81
21	Kalimantan Tengah	0,41	0,91	1,17	1,07	1,31	1,33	1,32	1,20	1,24	1,27
22	Kalimantan Selatan	0,47	1,05	1,34	1,22	1,52	1,54	1,53	1,39	1,44	1,49
23	Kalimantan Timur	0,24	0,54	0,69	0,63	0,77	0,78	0,77	0,71	0,74	0,77
24	Kalimantan Utara	0,13	0,30	0,38	0,35	0,44	0,45	0,44	0,40	0,42	0,43
25	Sulawesi Utara	0,38	0,86	1,10	1,00	1,22	1,24	1,23	1,12	1,16	1,19
26	Sulawesi Tengah	0,48	1,07	1,37	1,25	1,53	1,56	1,54	1,40	1,45	1,49
27	Sulawesi Selatan	0,64	1,42	1,82	1,66	2,27	2,32	2,29	2,08	2,17	2,25
28	Sulawesi Tenggara	0,51	1,14	1,46	1,33	1,59	1,62	1,61	1,46	1,50	1,55
29	Gorontalo	0,18	0,40	0,51	0,47	0,59	0,60	0,59	0,55	0,56	0,58
30	Sulawesi Barat	0,17	0,37	0,48	0,44	0,54	0,55	0,55	0,50	0,52	0,53
31	Maluku	0,30	0,68	0,87	0,79	1,04	1,06	1,05	0,96	0,99	1,02
32	Maluku Utara	0,26	0,59	0,75	0,69	0,87	0,89	0,88	0,80	0,83	0,86
33	Papua	0,74	1,66	2,13	1,94	4,26	4,34	4,29	3,90	3,97	4,10
34	Papua Barat	0,35	0,78	1,00	0,91	1,45	1,47	1,46	1,33	1,38	1,43
	TOTAL NASIONAL	20,67	46,98	60,00	60,00	70,00	71,19	72,00	68,00	70,00	71,00

Sumber: Kementerian Keuangan RI (DJPK)

Pembangunan nasional yang berkeadilan di Indonesia saat ini berfokus pada penguatan daerah pinggiran melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan Dana Desa muncul sebagai instrumen fiskal strategis untuk mewujudkan kemandirian desa, yang menurut Sutoro Eko (2015) dalam bukunya yang berjudul "*Regulasi Baru, Desa Baru*", merupakan upaya

mengembalikan kedaulatan desa agar tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang menentukan arah kemajuannya sendiri. Dana Desa diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Azwardi dan Sukanto (2014) dalam jurnal "*Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi*" menyatakan bahwa alokasi dana ini berfungsi sebagai stimulus untuk menggerakkan sektor riil dan produktivitas ekonomi di tingkat akar rumput, sehingga mampu menekan angka urbanisasi dan ketimpangan wilayah.

Data pengalokasian Dana Desa di 34 provinsi sepanjang periode 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap mencerminkan prioritas geografis tertentu. Provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, secara konsisten menerima alokasi terbesar dengan angka yang melampaui 6 hingga 8 triliun rupiah per tahun. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah desa dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah luar Jawa seperti Aceh dan Papua juga menunjukkan angka alokasi yang signifikan, yakni berada di kisaran 4 triliun rupiah. Distribusi ini mengonfirmasi pandangan Brotodispoto (2021) dalam studinya mengenai kebijakan fiskal daerah, yang menyebutkan bahwa formula pembagian Dana Desa didasarkan pada variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna mencapai pemerataan antarwilayah.

Namun, tantangan besar terlihat pada periode tahun 2022, di mana terjadi penurunan total alokasi nasional dari 72 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 68 triliun rupiah. Penurunan ini merata di hampir seluruh provinsi, termasuk

Sumatera Utara yang turun dari 4,50 triliun menjadi 4,15 triliun, serta Sulawesi Selatan dari 2,29 triliun menjadi 2,08 triliun. Fenomena ini berkaitan erat dengan kebijakan *refocusing* anggaran pemerintah pusat untuk penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Meskipun demikian, tren kembali menunjukkan pemulihan pada tahun 2023 dan 2024, di mana total dana nasional kembali menyentuh angka 71 triliun rupiah. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat struktur ekonomi desa, sebagaimana ditekankan oleh Mubyarto (2000) dalam buku "*Ekonomi Rakyat, Logika Ekonomi Pancasila*", bahwa pembangunan ekonomi yang tangguh harus berakar pada pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat desa.

Meskipun dukungan anggaran terus meningkat, efektivitas penggunaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Syaifullah (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "*Impact of Village Fund on Poverty Reduction in Indonesia*" mengungkapkan bahwa besarnya alokasi dana belum tentu berbanding

lurus dengan penurunan angka kemiskinan jika tidak dibarengi dengan kapasitas manajerial perangkat desa yang mumpuni serta pengawasan yang ketat. Kesenjangan kapasitas antarprovinsi, tingginya ketergantungan fiskal desa terhadap pusat, serta isu transparansi menjadi poin krusial yang perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, analisis mengenai pola distribusi dan dampak nyata Dana Desa di 34 provinsi menjadi sangat relevan untuk dipelajari guna memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Alokasi Dana Desa, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, juga mengalami peningkatan dari Rp34,7 triliun (2022) menjadi Rp36,9 triliun (2023),

dan Rp38 triliun (2024). Pertumbuhan ADD sejalan dengan kebijakan transfer ke daerah yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. ADD berperan sebagai instrumen pelengkap Dana Desa, sehingga peningkatan ini memperluas ruang fiskal desa untuk membiayai operasional pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan lokal sesuai kebutuhan spesifik wilayah. **Berikut ini Tabel 1.6 Alokasi Dana Desa/ADD (satuan triliun rupiah) pada tahun 2015-2024 di 34 Provinsi di Indonesia sebagai berikut:**

Tabel 1. 6 Alokasi Dana Desa di 34 provinsi di Indonesia patahun 2015-2024.

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	1,12	1,36	1,54	1,60	1,68	1,72	1,77	1,71	1,82	1,87
2	Sumatera Utara	1,36	1,65	1,87	1,94	2,04	2,09	2,15	2,07	2,21	2,27
3	Sumatera Barat	0,36	0,44	0,50	0,51	0,54	0,55	0,57	0,55	0,59	0,60
4	Riau	0,65	0,78	0,89	0,93	0,97	0,99	1,02	0,99	1,06	1,09
5	Jambi	0,37	0,45	0,51	0,53	0,56	0,58	0,60	0,57	0,61	0,63
6	Sumatera Selatan	0,76	0,92	1,05	1,09	1,14	1,18	1,21	1,17	1,25	1,28
7	Bengkulu	0,28	0,34	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,43	0,46	0,47
8	Lampung	0,69	0,83	0,95	0,98	1,03	1,06	1,09	1,05	1,12	1,15
9	Kep. Bangka Belitung	0,13	0,16	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,22
10	Kepulauan Riau	0,11	0,14	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,19
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	1,98	2,41	2,74	2,84	2,98	3,07	3,16	3,04	3,24	3,33
13	Jawa Tengah	2,86	3,47	3,94	4,09	4,29	4,41	4,55	4,38	4,67	4,80
14	DI Yogyakarta	0,19	0,23	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,30	0,32	0,33
15	Jawa Timur	2,70	3,27	3,72	3,86	4,05	4,16	4,29	4,13	4,40	4,53
16	Banten	0,48	0,58	0,66	0,69	0,72	0,74	0,77	0,74	0,78	0,81
17	Bali	0,31	0,38	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	0,48	0,51	0,53
18	NTB	0,45	0,55	0,62	0,65	0,68	0,71	0,73	0,70	0,75	0,77
19	NTT	0,73	0,88	1,00	1,04	1,09	1,12	1,15	1,11	1,18	1,21
20	Kalimantan Barat	0,61	0,73	0,83	0,87	0,91	0,93	0,96	0,92	0,98	1,01
21	Kalimantan Tengah	0,47	0,57	0,64	0,67	0,70	0,72	0,74	0,72	0,76	0,79
22	Kalimantan Selatan	0,52	0,63	0,72	0,74	0,78	0,80	0,82	0,79	0,84	0,87
23	Kalimantan Timur	0,43	0,52	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,67	0,71	0,73

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
24	Kalimantan Utara	0,17	0,21	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,27	0,29	0,29
25	Sulawesi Utara	0,33	0,40	0,46	0,48	0,50	0,51	0,53	0,51	0,54	0,56
26	Sulawesi Tengah	0,48	0,58	0,66	0,69	0,72	0,74	0,77	0,74	0,78	0,81
27	Sulawesi Selatan	0,91	1,10	1,25	1,30	1,36	1,41	1,45	1,40	1,49	1,53
28	Sulawesi Tenggara	0,49	0,60	0,68	0,71	0,74	0,77	0,79	0,76	0,81	0,84
29	Gorontalo	0,16	0,19	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,25	0,27	0,27
30	Sulawesi Barat	0,17	0,21	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,27	0,29	0,29
31	Maluku	0,28	0,34	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44	0,43	0,46	0,47
32	Maluku Utara	0,24	0,29	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,37	0,40	0,41
33	Papua (Total)	1,13	1,37	1,56	1,62	1,70	1,75	1,81	1,74	1,86	1,91
34	Papua Barat (Total)	0,42	0,51	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	0,65	0,69	0,71
	TOTAL NASIONAL	21,65	26,20	29,85	31,05	32,50	33,41	34,45	34,70	36,90	38,00

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa, Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data Tabel 1.6 mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) di 34 provinsi pada periode 2015-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil secara nasional, di mana total alokasi tumbuh dari 32,50 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 38,00 triliun rupiah pada tahun 2024. Secara spasial, distribusi ADD menunjukkan konsentrasi yang tinggi di Pulau Jawa, dengan Jawa Tengah mencatat alokasi terbesar mencapai 4,80 triliun rupiah pada tahun 2024, disusul oleh Jawa Timur (4,53 triliun) dan Jawa Barat (3,33 triliun). Hal ini mencerminkan struktur demografis dan jumlah desa yang padat di wilayah tersebut. Fenomena ini didukung oleh pendapat Brotodispoto (2021) dalam studinya mengenai desentralisasi fiskal, yang menyatakan bahwa besaran alokasi dana ke daerah sangat dipengaruhi oleh variabel beban administrasi dan jumlah unit pemerintahan desa guna menjamin stabilitas pelayanan publik di tingkat paling bawah.

Menariknya, meskipun terjadi gejolak ekonomi global, data menunjukkan bahwa ADD relatif lebih stabil dibandingkan dana transfer lainnya. Sebagai contoh, di Provinsi Sumatera Utara, alokasi meningkat secara konsisten dari 2,04 triliun (2019) hingga mencapai 2,27 triliun (2024). Di wilayah Timur Indonesia, Papua (Total) juga mendapatkan perhatian signifikan dengan kenaikan dari 1,70 triliun menjadi 1,91 triliun dalam periode yang sama. Stabilitas ini sangat krusial, karena menurut Mubyarto (2000) dalam buku *"Ekonomi Rakyat, Logika Ekonomi Pancasila"*, keberlanjutan pendanaan di tingkat desa adalah kunci untuk menjaga resiliensi ekonomi rakyat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi makro. Berbeda dengan wilayah lain, DKI Jakarta tetap berada pada angka 0 triliun dikarenakan status administratifnya yang tidak memiliki desa, melainkan kelurahan yang didanai melalui skema APBD daerah secara langsung.

Namun demikian, peningkatan alokasi dana secara berkelanjutan ini juga membawa tantangan besar terkait akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Syaifullah (2020) dalam jurnalnya yang berjudul *"Impact of Village Fund on Poverty Reduction in Indonesia"* mengingatkan bahwa ketersediaan dana yang besar melalui ADD harus dibarengi dengan transparansi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia di desa. Tanpa manajemen yang baik, besarnya ADD berisiko hanya menjadi beban administratif tanpa memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pola Alokasi Dana Desa di 34 provinsi ini menjadi sangat penting untuk memetakan sejauh mana dukungan fiskal tersebut mampu bertransformasi menjadi katalisator pembangunan desa yang berkelanjutan dan mandiri sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Desa.

Berbeda dengan DD dan ADD, Dana Alokasi Khusus justru mengalami fluktuasi. Pada 2022, DAK mencapai Rp191,1 triliun, turun menjadi Rp183,7 triliun di 2023, lalu naik kembali ke Rp187,6 triliun di 2024. Fluktuasi ini mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal nasional, di mana DAK diarahkan untuk mendukung program prioritas sektoral seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Penurunan di 2023 dapat dikaitkan dengan penyesuaian belanja negara pasca-pandemi, sementara kenaikan di 2024 menunjukkan adanya dorongan kembali pada pembangunan sektoral strategis.

Tabel 1. 7 Dana Alokasi Khusus/DAK di 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2024

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2,31	3,57	6,92	7,37	7,12	6,55	6,82	7,34	7,05	7,20
2	Sumatera Utara	3,16	4,87	9,45	10,06	9,72	8,95	9,35	10,05	9,66	9,87
3	Sumatera Barat	1,64	2,52	4,90	5,21	5,04	4,64	4,85	5,21	5,01	5,12
4	Riau	1,53	2,36	4,58	4,87	4,71	4,33	4,52	4,86	4,67	4,77
5	Jambi	1,13	1,74	3,37	3,59	3,47	3,20	3,34	3,59	3,45	3,53
6	Sumatera Selatan	2,05	3,16	6,13	6,52	6,30	5,80	6,05	6,51	6,26	6,39
7	Bengkulu	0,98	1,50	2,92	3,11	3,00	2,76	2,88	3,09	2,97	3,04
8	Lampung	2,16	3,32	6,45	6,86	6,63	6,10	6,37	6,85	6,58	6,73
9	Kep. Bangka Belitung	0,67	1,03	2,00	2,13	2,06	1,89	1,97	2,12	2,04	2,08
10	Kepulauan Riau	0,69	1,07	2,07	2,21	2,13	1,96	2,04	2,20	2,11	2,16
11	DKI Jakarta	0,38	0,58	1,13	1,20	1,16	1,34	1,52	2,11	2,85	3,37
12	Jawa Barat	5,35	8,24	16,00	17,04	16,46	15,14	15,82	17,01	16,36	16,71
13	Jawa Tengah	4,84	7,45	14,46	15,39	14,87	13,68	14,30	15,37	14,78	15,10
14	D.I. Yogyakarta	0,79	1,21	2,35	2,51	2,42	2,23	2,33	2,51	2,41	2,46

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	Jawa Timur	5,12	7,88	15,2 9	16,2 8	15,7 3	14,4 7	15,1 3	16,2 6	15,6 3	15,9 7
16	Banten	1,48	2,28	4,42	4,71	4,55	4,19	4,38	4,70	4,52	4,62
17	Bali	0,96	1,48	2,87	3,05	2,95	2,71	2,83	3,05	2,93	3,00
18	NTB	1,36	2,10	4,07	4,34	4,19	3,85	4,03	4,33	4,16	4,25
19	NTT	2,37	3,65	7,08	7,54	7,28	6,70	7,00	7,53	7,24	7,39
20	Kalimantan Barat	1,69	2,60	5,06	5,38	5,20	4,79	5,00	5,38	5,17	5,28
21	Kalimantan Tengah	1,17	1,81	3,51	3,74	3,61	3,32	3,47	3,73	3,59	3,67
22	Kalimantan Selatan	1,24	1,91	3,71	3,95	3,82	3,51	3,67	3,95	3,80	3,88
23	Kalimantan Timur	1,21	1,87	3,63	3,86	3,73	3,43	3,59	3,86	3,71	3,79
24	Kalimantan Utara	0,54	0,83	1,61	1,71	1,65	1,52	1,59	1,71	1,64	1,68
25	Sulawesi Utara	0,99	1,52	2,96	3,15	3,04	2,79	2,92	3,14	3,02	3,08
26	Sulawesi Tengah	1,29	1,99	3,86	4,11	3,97	3,65	3,82	4,10	3,95	4,03
27	Sulawesi Selatan	2,45	3,77	7,32	7,79	7,53	6,93	7,24	7,79	7,49	7,65
28	Sulawesi Tenggara	1,25	1,93	3,74	3,98	3,85	3,55	3,70	3,98	3,83	3,91
29	Gorontalo	0,53	0,81	1,58	1,68	1,62	1,49	1,56	1,67	1,61	1,64
30	Sulawesi Barat	0,61	0,95	1,84	1,96	1,89	1,74	1,81	1,95	1,88	1,92
31	Maluku	1,12	1,73	3,36	3,57	3,45	3,18	3,32	3,57	3,43	3,51
32	Maluku Utara	0,74	1,14	2,21	2,35	2,27	2,08	2,18	2,34	2,25	2,30
33	Papua	2,04	3,14	6,09	6,48	6,26	5,76	6,03	6,48	4,80	4,50
34	Papua Barat	0,98	1,50	2,92	3,11	3,00	2,76	2,89	3,10	2,95	3,01
	TOTAL NASIONAL	58,2	89,8	174, 2	185, 4	179, 0	175, 2	180, 5	191, 1	183, 7	187, 6

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)

Berdasarkan data pada Tabel 1.7, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di 34 provinsi pada periode 2015-2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dengan total alokasi nasional yang berfluktuasi namun cenderung meningkat, dari 179 triliun rupiah (2019) menjadi 187,6 triliun rupiah (2024). Provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara konsisten menerima alokasi tertinggi, di mana Jawa Barat mencatat angka puncaknya sebesar 17,01 triliun rupiah pada tahun 2022. Di sisi lain, DKI Jakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang unik, melonjak dari 1,16 triliun (2019) menjadi 3,37 triliun (2024). Fenomena distribusi ini selaras dengan temuan Azwardi dan Sukanto (2014) dalam jurnal "*Efektivitas Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi*", yang secara implisit menjelaskan bahwa alokasi dana transfer daerah diatur sedemikian rupa untuk menyeimbangkan antara beban populasi yang besar di wilayah Barat dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur mendasar di wilayah Timur.

Dinamika DAK juga terlihat jelas pada wilayah luar Jawa, seperti Sumatera Utara yang stabil di kisaran 9 triliun rupiah dan Sulawesi Selatan di angka 7 triliun rupiah. Namun, terlihat adanya kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh provinsi mengalami penurunan alokasi, seperti Aceh yang turun dari 7,12 triliun menjadi 6,55 triliun rupiah. Menurut Brotodispoto (2021) dalam analisis kebijakan fiskalnya, fluktuasi ini merupakan bentuk respons pemerintah dalam melakukan penyesuaian anggaran (*refocusing*) untuk menangani krisis kesehatan global tanpa mengabaikan pembangunan daerah secara permanen. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan layanan publik, mengingat DAK adalah tumpuan utama bagi

banyak daerah dalam membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur fisik yang tidak mampu dicover sepenuhnya oleh PAD daerah masing-masing.

Kendati jumlah alokasi DAK terus diperbesar, efektivitas dan transparansi pengelolaannya tetap menjadi perhatian utama para akademisi. Syaifullah (2020) dalam jurnalnya *"Impact of Village Fund on Poverty Reduction in Indonesia"* memberikan peringatan bahwa besarnya dana transfer, termasuk DAK, hanya akan menjadi beban fiskal jika tidak disertai dengan peningkatan kapasitas birokrasi daerah dalam mengeksekusi program. Seringkali muncul masalah keterlambatan penyerapan anggaran yang berakibat pada tidak maksimalnya dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai pola distribusi DAK di 34 provinsi sepanjang 2015-2024 sangat krusial untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana dana tersebut telah berhasil memperkecil kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata sesuai visi pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan desa (DD dan ADD) dengan pembangunan sektoral (DAK). Tren peningkatan DD dan ADD memperkuat basis pembangunan desa, sedangkan DAK yang fluktuatif menandakan fleksibilitas fiskal dalam merespons kebutuhan nasional. Bagi penelitian Anda, data ini bisa dijadikan dasar untuk menganalisis hubungan antara instrumen fiskal tersebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM), terutama apakah peningkatan DD dan ADD berkontribusi signifikan terhadap kemajuan status desa, sementara DAK lebih berperan pada aspek sektoral yang mendukung kualitas hidup masyarakat desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks desa membangun tentunya tidak terlepas dari fenomena ekonomi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Fenomena ekonomi utama yang mendominasi Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 adalah guncangan ekstrem yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, diikuti oleh fase pemulihan yang didukung oleh kebijakan fiskal ekspansif, yang semuanya memiliki dampak langsung terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% dan disrupsi rantai pasok global berpotensi memperlambat peningkatan IDM, khususnya pada dimensi Ketahanan Ekonomi dan Sosial desa. Namun, respons kebijakan melalui pengalokasian Dana Desa dan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa berfungsi sebagai bantalan sosial dan stimulus pembangunan infrastruktur dasar, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat perdesaan dan mencegah penurunan status desa secara massal. Akibatnya, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-2021 yang kembali mencapai tingkat pertumbuhan di atas 5%, terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan pada status IDM, ditandai dengan penurunan tajam jumlah desa tertinggal dan peningkatan status desa maju/mandiri, menunjukkan ketahanan dan efektivitas kebijakan *bottom-up* dalam menghadapi krisis makroekonomi.

Berdasarkan fenomena serta penelitian terdahulu yang ada terdapat kesenjangan dalam penelitian yakni masih belum banyak penelitian yang meneliti mengenai kebijakan dana desa terhadap indeks desa membangun, padahal secara teoritis kebijakan dana desa berpengaruh terhadap indeks desa membangun. Secara wilayah yang diteliti juga berbeda, peneliti terdahulu lebih berfokus pada satu daerah, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada jangkauan yang lebih

luas yakni 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, secara teori apabila dana desa setiap tahunnya ada dan nilainya meningkat secara berangsur-berangsur seharusnya permasalahan ekonomi di Indonesia mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan permasalahan lainnya terutama di tingkat desa dapat teratasi.

Namun pada kenyataannya justru permasalahan ekonomi tersebut masih ditemukan, dan untuk jumlah desa berkembang masih mendominasi dibandingkan dengan desa maju. Oleh sebab itu, peneliti tertarik menganalisis lebih lanjut dengan judul **“Analisis Yang Mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) Di Indonesia Pada Tahun 2015-2024 ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat di tentukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi perkembangan desa di Indonesia yang tercermin dari indeks desa membangun, meskipun alokasi dana desa terus ada setiap tahunnya dan bahkan dapat meningkat, tetapi indeks desa membangun masih didominasi oleh desa dengan kondisi tahap berkembang.
- 2) Belum adanya bukti empiris yang komprehensif ditingkat 34 provinsi mengenai interaksi sinergi antara dana desa, alokasi dana desa, dan dana alokasi khusus secara kolektif mempengaruhi percepatan peningkatan nilai IDM.
- 3) Adanya perbedaan cakupan dimensi dan tahun publikasi antara indeks pembangunan desa oleh Badan Pusat Statistik dan indeks desa membangun oleh Kementerian Desa menciptakan keterbatasan dalam analisis pembangunan desa yang komprehensif, sehingga penelitian harus

memfokuskan diri pada IDM untuk memastikan validitas analisis kebijakan dalam periode yang relevan yakni 2015-2024.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini mengacu pada identifikasi masalah serta latar belakang masalah penelitian untuk mencapai fokus penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini menganalisa pada seberapa besar dampak kebijakan dana desa yang diprosikan dengan dana desa, alokasi dana desa, dan dana alokasi khusus terhadap indeks desa membangun di Indonesia periode 2019 - 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta batasan masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perkembangan Indeks Desa Membangun di Indonesia?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarakn output yang ingin dicapai pada penelitian, oleh sebab itu tujuan penelitian ini disusun mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis ekonomi secara deskriptif tentang Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia.

- 2) Menganalisis dan mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat sumber referensi tambahan bagi mahasiswa dan akademisi, serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus terhadap perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas kebijakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Desa Membangun.

b. Manfaat Non-Akademik

Penelitian ini juga ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang di sektor pemerintahan pusat maupun daerah dalam merumuskan strategi alokasi Dana Desa, ADD, dan DAK agar lebih tepat sasaran dalam meningkatkan IDM. Serta menjadi masukan bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan desa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis yang relevan di sektor tersebut.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya (Putri et al., 2024). Pembangunan ekonomi dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja dalam suatu negara. Proses pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran berbagai sektor diantaranya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus untuk mendorong proses industrialisasi yang cepat agar dapat mendorong berjalannya ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, selain itu tetap mengejar akselerasi dari pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Halim & Taryani, 2023). Adanya pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, serta teknologi yang semakin meningkat. Implikasi yang diharapkan dari pembangunan ekonomi kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Calista et al., 04).

Proses pembangunan ekonomi tidak bisa terjadi secara instan, namun diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, yakni pembentukan atau pengumpulan modal (Logor et al., 2021). Pembentukan modal terdiri atas modal materil dan modal manusia. Terdapat berbagai pendapat bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, namun secara riil nya materil dan modal manusia harus saling beriringan. Agar tujuan pokok pembangunan ekonomi dapat tercipta. Berikut teori-teori mengenai pembangunan ekonomi:

2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

a. Adam Smith

Menurut Adam Smith, teori pembangunan ekonomi didasarkan pada prinsip pembagian kerja atau spesialisasi (Martadinata, 2022). Dalam bukunya, *The Wealth of Nations*, ia berpendapat bahwa spesialisasi dalam produksi dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas ini memungkinkan lebih banyak barang diproduksi dengan jumlah tenaga kerja yang sama, yang pada gilirannya akan memacu akumulasi modal. Akumulasi modal ini kemudian diinvestasikan kembali untuk meningkatkan produksi lebih lanjut, menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Adam Smith juga percaya bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan paling efektif dalam sistem pasar bebas, di mana individu didorong oleh kepentingan pribadi mereka dan 'tangan tak terlihat' pasar akan mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling produktif, tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan.

b. David Ricardo

Teori pembangunan ekonomi David Ricardo berfokus pada dinamika antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan keterbatasan lahan (Martadinata, 2022). Dalam karyanya, *On the Principles of Political Economy and Taxation*, ia berpendapat bahwa seiring dengan peningkatan populasi, lahan yang kurang subur akan mulai digunakan untuk produksi, yang menyebabkan berlakunya Hukum Pengurangan Hasil yang Semakin Menurun (*Law of Diminishing Returns*). Hal ini berarti bahwa setiap unit tenaga kerja tambahan yang dipekerjakan pada lahan tersebut akan menghasilkan output yang semakin kecil. Akibatnya, sewa tanah (*rent*) yang diterima oleh pemilik tanah akan meningkat, sementara keuntungan (*profit*) bagi para kapitalis akan menurun. Penurunan keuntungan ini akan memperlambat akumulasi modal dan investasi, yang pada akhirnya akan menyebabkan ekonomi mencapai kondisi stagnasi atau keadaan stasioner (*stationary state*), di mana pertumbuhan ekonomi terhenti.

c. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis, yang dikenal sebagai Model Dua Sektor atau *Dual Sector Model*, menjelaskan proses pembangunan suatu negara berkembang melalui perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern (Suwarni, 2021). Sektor tradisional, yang biasanya berbasis pertanian, diasumsikan memiliki surplus tenaga kerja dengan produktivitas marjinal yang sangat rendah, bahkan mendekati nol. Di sisi lain, sektor modern (industri) memiliki produktivitas tinggi dan membutuhkan tenaga kerja. Menurut Lewis, pembangunan ekonomi terjadi ketika tenaga kerja berlebihan dari sektor tradisional bermigrasi ke sektor modern yang menawarkan upah lebih tinggi.

Keuntungan yang dihasilkan oleh sektor modern kemudian diinvestasikan kembali untuk memperluas kapasitas produksi, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari sektor tradisional. Proses ini terus berlanjut hingga surplus tenaga kerja di sektor tradisional habis terserap, di mana titik ini dikenal sebagai Titik Balik Lewis (*Lewis turning point*), setelah itu upah di kedua sektor mulai naik.

d. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B.Chenery

Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery berfokus pada perubahan struktural yang sistematis dalam perekonomian suatu negara seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita (Malau et al., 2024). Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya berfokus pada faktor tunggal, Chenery menggunakan analisis ekonometri dan data empiris dari banyak negara untuk mengidentifikasi pola-pola pembangunan (*patterns of development*). Ia menemukan bahwa ada perubahan yang dapat diprediksi dalam komposisi produksi, permintaan, dan penggunaan sumber daya dari sektor pertanian ke industri, lalu ke jasa. Intinya, pembangunan bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang transformasi fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara, dari ekonomi tradisional yang didominasi pertanian menjadi ekonomi modern yang lebih beragam dan berorientasi pada industri dan jasa.

e. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis, yang sering dianggap sebagai penyempurnaan dari model Arthur Lewis, menjelaskan transisi suatu perekonomian dari negara agraris dengan surplus tenaga kerja ke negara industri yang lebih maju (Malau et al., 2024). Model ini berfokus pada hubungan timbal

balik antara sektor pertanian dan industri. Menurut Fei dan Ranis, pembangunan terjadi melalui tiga tahapan utama: (1) tahap pengangguran terselubung, di mana surplus tenaga kerja dari sektor pertanian yang produktivitas marginalnya mendekati nol dipindahkan ke sektor industri tanpa mengurangi output pertanian; (2) tahap surplus tenaga kerja yang terbatas, di mana produktivitas marginal di sektor pertanian mulai meningkat dan upah di sektor industri mulai naik; dan (3) tahap swadaya (*self-sustaining growth*), di mana surplus tenaga kerja habis, dan perekonomian sepenuhnya menjadi industrial, dengan upah yang ditentukan oleh pasar. . Teori ini menekankan pentingnya sektor pertanian tidak hanya sebagai pemasok tenaga kerja, tetapi juga sebagai sumber surplus pangan dan modal yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan sektor industri.

2.1.2 Konsep Dasar Pembangunan Desa

2.1.2.1 Teori Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Ichsan et al., 2023). Pembangunan desa terkait dengan proses transformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Desa, sebagai unit terkecil dalam suatu negara, memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan peran kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

Pembangunan desa sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa (Boekoesoe & Maksun, 2022). Namun dalam perkembangannya, pembangunan desa yang telah dilaksanakan sejak dahulu hingga sekarang masih terus memerlukan perhatian khusus. Perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya terhadap program tertentu tetapi juga terhadap berbagai aspek meliputi upaya meningkatkan infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, serta pemberdayaan masyarakat. Adanya pembangunan desa tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pembangunan desa diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan potensi lokal, seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata sehingga mampu mencaiptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan.
- b. Perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi yang merupakan modal utama dalam pembangunan. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
- c. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
- d. Penguatan kelembagaan sosial dan budaya melalui pelestarian kearifan lokal, penguatan gotong royong, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan

- e. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan utama mewujudkan desa yang mandiri, maju, kuat, dan berkelanjutan masyarakatnya agar dapat mengelola potensi dan sumber dayanya sendiri untuk mencapai kemakmuran bersama.

2.1.2.2 Pendekatan-pendekatan dalam pembangunan desa (*top-down* vs *bottom-up*)

Pendekatan pembangunan desa dengan top down merupakan model pembangunan yang tingkat perencanaan dimulai dari atas kebawah atau bersumber dari pemerintah pusat atau daerah yang diturunkan ke bawah sampai ke pihak desa dengan masyarakat berperan sebagai objek pelaksana program dan penerima hasil, bukan sebagai perumus kebijakan (Amnurdiant et al., 2024). Pendekatan top down dalam pembangunan desa memiliki beberapa kelebihan meliputi program yang dapat terorganisi dengan baik dan konsisten, namun juga menimbulkan kelemahan yakni masyarakat menjadi cenderung pasif, kurang kreatif, dan ada potensi program tidak sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat. Contoh dari pendekatan pembangunan desa top-down yakni, pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program nasional yang kemudian diwajibkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa tanpa banyak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan tujuan dan metodenya.

Pendekatan pembangunan desa bottom up merupakan proses perencanaan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari bawah ke atas (Amin, 2020). Penjelasan mengenai bawah ke atas yang dimaksudkan adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berasal dari aspirasi masyarakat desa dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan, dimulai dari identifikasi

kebutuhan hingga pengawasan. Pendekatan bottom up menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Prinsip utama pendekatan bottom up adalah partisipasi aktif masyarakat, berbasis aspirasi rakyat, masyarakat sebagai subjek pembangunan, dan pemerintah sebagai fasilitator. Proses pelaksanaannya dimulai dari identifikasi kebutuhan, musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasan. Contoh dari pendekatan pembangunan bottom up adalah pembangunan infrastruktur desa, yakni masyarakat desa bersama-sama dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sumur air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pertanian, sehingga akhirnya dibuatkan sumur bor.

2.1.2.3 Urgensi dan Tantangan Pembangunan Desa di Indonesia

Desa merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional di Indonesia. Potensi yang dimiliki desa memegang peranan yang terkait erat pemanfaatan sumber daya ekonomi, sehingga berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya pembangunan desa tentu akan berperan terhadap pembangunan nasional yang menjadi fondasi negara. Berikut peran strategis desa dalam pembangunan nasional (Herdiana, 2020):

- 1) Pilar ketahanan pangan: Desa-desa di Indonesia merupakan daerah yang memiliki sektor pertanian yang sumber sebagai produsen utama bahan pangan. Peran desa memastikan ketersediaan pangan nasional sangat krusial. Produksi

pangan yang ada di desa akan efektif apabila dari sisi pembangunannya merata sehingga desa yang mandiri pangan akan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional.

- 2) Penggerak ekonomi lokal : Desa memiliki potensi besar untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui berbagai sektor, mulai dari UMKM, pariwisata, dan pengembangan produk unggulan. UMKM di desa dapat bergerak dibidang kerajinan, kuliner, dan agrobisnis. Pariwisata di desa dapat menjadi salah satu tren yang berhasil menggerakkan ekonomi lokal apabila dikelola dengan baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan produk unggulan, mendorong desa untuk mengembangkan produk khas yang memiliki nilai jual tinggi.
- 3) Pelestarian budaya dan kearifan lokal: Desa menjadi benteng terakhir dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif diperlukan agar tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan dapat terwujud.

Pembangunan desa tentu tidak berjalan secara mulus, dalam tahapannya pasti melalui proses yang memunculkan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh suatu daerah. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa terkait dengan kondisi ekonomi didaerah tersebut. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan desa (Djahmiq & Dr.Salahudin, 2022):

- a. Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan ekstrem yang perlu diselesaikan utamanya di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan notabennya lebih sering menjual hasil panen secara mentah dan memanfaatkan alam untuk menunjang kehidupannya. Adanya ketergantungan terhadap alam menyebabkan pendapatan masyarakat desa yang tidak menentu, sehingga rawan dengan adanya kemiskinan. Kemiskinan di desa menjadi tantangan dalam pembangunan desa, karena kemiskinan yang terus menerus dibiarkan akan menyebabkan desa tidak berkembang, sehingga pembangunan akan lebih efektif apabila permasalahan kemiskinan diselesaikan terlebih dahulu, sehingga pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di daerah desa rata-rata masih rendah, dikarenakan akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum memadai. Terdapat banyak kasus putus sekolah karena biaya dan juga keterbatasan akses pendidikan. Akibat adanya akses pendidikan yang terbatas menyebabkan sumber daya manusia di daerah pedesaan menjadi rendah, dikarenakan masyarakat desa rata-rata bekerja di sektor riil seperti petani, pekebun, dan juga tenaga serabutan. Akibat keterbatasan sumber daya manusia di desa menyebabkan pembangunan desa tidak berjalan optimal, dikarenakan masyarakat desa belum memahami kebutuhan apa saja yang harus mereka penuhi dan kelola.

c. Keterbatasan Anggaran

Anggaran desa diperoleh dari pemerintah dan sukarela dari masyarakat desa. Meskipun dana desa telah meningkat, jumlah dana yang tersedia masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan di desa.

Kebutuhan pembangunan di desa tidak hanya terkait infrastruktur tetapi juga terkait penduduknya. Permasalahan tersebut tentunya lebih kompleks untuk diselesaikan dibandingkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat kota. Pengalokasian anggaran yang terbagi-bagi menjadi berbagai bagian menyebabkan pembangunan desa menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, diperlukan anggaran yang cukup yang sesuai dengan perencanaan desa agar pembangunan desa dapat terlaksana.

d. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi

Tantangan pembangunan desa yang tidak kalah penting adalah terkait ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dihadapi mencakup akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar, teknologi, dan sumber daya keuangan yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan peningkatan pembangunan infrastruktur, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Apabila permasalahan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat teratasi maka pembangunan ekonomi desa juga dapat terlaksana dengan baik.

e. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat desa masih banyak yang menganggap bahwa pembangunan desa itu tidak penting, mereka lebih berfokus terhadap pekerjaan mereka sehari-hari, misalnya petani jagung di desa yang sibuk mengelola lahan jagungnya. Tidak hanya masyarakat desa yang berfokus pada pekerjaannya, namun masyarakat desa terhambat dengan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah desa, kurangnya akses informasi, hambatan geografis, merasa dirugikan, ketidaksetaraan

kekuasaan, dan kurangnya kepemimpinan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi enggan dalam berkontribusi pada kegiatan desa, sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan desa.

2.1.3 Kebijakan Dana Desa

2.1.3.1 Dasar Hukum dan Latar Belakang Kebijakan Dana Desa

Dasar hukum utama dari kebijakan Dana Desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sering disebut UU Desa). Dana Desa sendiri didefinisikan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep Dana Desa berakar dari berbagai program pembangunan pedesaan sebelumnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dan PNPM Mandiri Perdesaan, namun kebijakan ini mengalami transformasi fundamental setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengubah paradigma dari "negara membangun desa" menjadi "desa membangun dirinya sendiri". Sejak pertama kali dikucurkan pada tahun 2015, Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, dan seiring waktu, prioritas penggunaannya telah berevolusi, mulai dari fokus awal

pada pembangunan infrastruktur fisik hingga mencakup pemberdayaan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan adaptasi terhadap isu-isu nasional seperti pandemi COVID-19 melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

2.1.3.2 Mekanisme dan Pengalokasian Dana Desa

Proses pengelolaan Dana Desa dimulai dengan tahap perencanaan yang sangat partisipatif, di mana Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan kemudian menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang memuat rincian kegiatan dan alokasi dana (Sufiqri, 2023). Setelah APB Desa disahkan, tahap pencairan dana dilakukan oleh Pemerintah Pusat dari APBN melalui transfer bertahap ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dicairkan ke Rekening Kas Desa berdasarkan permohonan yang telah diverifikasi kelengkapan administrasinya. Terakhir, tahap penggunaan dana harus dilakukan secara swakelola dan padat karya tunai untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disepakati dalam APB Desa, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal, dan diakhiri dengan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa.

Besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ditetapkan secara berkeadilan, mencakup dua komponen utama (Candra, 2023): Alokasi Dasar yang dibagi rata untuk semua desa, dan Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan variabel-variabel spesifik desa. Faktor-faktor utama dalam Alokasi Formula meliputi jumlah

penduduk desa, tingkat kemiskinan penduduk desa (diukur dari jumlah penduduk miskin), luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis (diukur dari Indeks Kemahalan Konstruksi dan jarak tempuh), yang semuanya bertujuan untuk memastikan alokasi dana dapat mengatasi perbedaan karakteristik dan tantangan pembangunan antar desa.

2.1.3.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Fokus utama penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mewujudkan dua pilar pembangunan di tingkat akar yakni: Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan fisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur desa, seperti jalan desa, jembatan, sarana air bersih, Polindes, dan fasilitas pendidikan anak usia dini. Sementara itu, Pemberdayaan Masyarakat mencakup upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan kelembagaan ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kegiatan yang mendorong partisipasi dan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan tujuan akhir untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan (Rahmah et al., 2021).

Peraturan terkait prioritas alokasi Dana Desa ditetapkan secara tahunan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT), yang fungsinya adalah mengarahkan penggunaan dana agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan tujuan SDGs Desa, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kearifan lokal. Secara umum, prioritas ini berfokus pada dua hal, yaitu Pembangunan Desa (seperti pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan

sumber daya alam) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu, regulasi ini juga secara spesifik menetapkan alokasi wajib minimum/maksimum untuk program tertentu yang strategis, seperti persentase alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan alokasi minimal untuk program ketahanan pangan dan hewani. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk mengatasi masalah sosial ekonomi mendesak serta membangun kapasitas berkelanjutan di desa (Boekoesoe & Maksum, 2022).

2.1.4 Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun

2.1.4.1 Pengertian dan Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks pembangunan desa merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia (Hidayati, 2021). Indeks ini mencakup berbagai dimensi dan indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa. Indeks pembangunan desa digunakan sebagai indikator pengukuran tingkat kemajuan desa sampai tahun 2018 dengan memiliki 5 dimensi dan 42 indikator yang menunjukkan perkembangan desa. Setelahnya terdapat Indeks desa membangun yang juga digunakan untuk mengevaluasi tingkat pembangunan desa, dengan fokus pada ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Berikut dimensi mengenai indeks pembangunan desa (IPD):

1. Pelayanan Dasar
2. Kondisi Infrastruktur
3. Aksesibilitas / Transportasi
4. Pelayanan Umum

5. Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.4.2 Pengertian dan Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks desa membangun merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia (Anggapratama et al., 2023). Indeks desa membangun dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan mencakup tiga dimensi utama yaitu: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi atau lingkungan. Tujuan dari IDM adalah untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran dan efektif, serta memfasilitasi perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kondisi nyata dilapangan. Berikut penjelasan Indikator dan dimensi IDM (Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan):

a. Indeks ketahanan sosial

Indeks ketahanan sosial meliputi beberapa indikator yakni: Pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.

b. Indeks ketahanan ekonomi

Indeks ketahanan ekonomi meliputi beberapa indikator yakni: Keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistic, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah.

c. Indeks ketahanan lingkungan

Indeks ketahanan lingkungan meliputi beberapa indikator yakni: Kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam indek desa membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang berkesinambungan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang menjadi kekuatan yang saling menjaga dan mengisi untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan didasarkan pada memperkuat nilai-nilai lokal serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Indeks desa membangun memotret perkembangan serta kemandirian desa dengan berdasarkan implementasi Undang-Undang desa dengan dukungan dana desa dan pendamping desa.

2.1.4.3 Persamaan antara IPD dan IDM

Persamaan utama antara IPD dan IDM yakni kedua sama-sama sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi status perkembangan desa di Indonesia. Kedua indeks ini mengklasifikasikan desa berdasarkan tingkat kemajuan mereka (Angraini, et al., 2022). Meskipun dikembangkan oleh lembaga yang berbeda, namun kedua indeks ini bertujuan untuk membantu perencanaan dan intervensi pembangunan desa agar lebih tepat sasaran. Berikut penjelasan mengenai persamaan keduanya:

- 1) Tujuan utama, keduanya dirancang untuk memotret kondisi desa secara komprehensif, mulai dari yang paling tertinggal hingga yang paling maju secara data nasional.

- 2) Dasar hukum, keduanya sama-sama memiliki dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- 3) Klasifikasi Desa, Keduanya sama-sama menggunakan kategori dengan konteks yang sama dengan mengukur desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.
- 4) Cakupan dimensi, keduanya sama-sama mengukur aspek yang berkaitan dengan pembangunan serupa seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan meskipun indikator yang digunakan ada yang berbeda.
- 5) Data dan informasi, keduanya sama-sama menyediakan data yang krusial bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, data tersebut nantinya dapat digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu bahan untuk merumuskan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan persamaan IPD dan IDM terdapat perbedaan antara IPD dan IDM yakni terletak pada lembaga pengelola dan dimensi pengukuran. IPD dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), sementara IDM dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Di Indonesia, IDM lebih banyak digunakan sebagai acuan utama oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengukur status perkembangan desa.

2.1.5 Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN disalurkan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa (Parnomo & Utami, 2024).

Tujuan dari adanya dana desa untuk menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Selain itu, dana ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui tiga fokus utama: pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Mekanisme pengelolaannya berada di tangan pemerintah desa dengan peran aktif dari masyarakat. Sementara itu, proses penyalurannya dilakukan melalui APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dana Desa memiliki dua tujuan utama yaitu (Anisa et al., 2024):

- 1) Pemberdayaan Masyarakat: Untuk membentuk desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan: Untuk mewujudkan pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera di tingkat desa.

Fungsi Dana Desa diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu (Muslianti, et al., 2022):

- 1) Pembangunan Fisik: Digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pasar.
- 2) Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendukung potensi desa melalui pelatihan usaha, pemberian bibit, dan bantuan peralatan, yang semuanya bertujuan meningkatkan ekonomi warga.
- 3) Mengatasi Masalah Sosial: Bertindak sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui proyek padat karya tunai dan bantuan kepada warga miskin.

Pengelolaan Dana Desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa bersama perangkat desa lainnya (seperti Sekretaris Desa dan bendahara). Pengelolaan ini harus didasarkan pada perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJMDesa, yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi spesifik desa. Pengelolaan Dana Desa wajib menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin penggunaan dana yang efektif dan tepat sasaran. Dana Desa diprioritaskan untuk empat bidang utama (Purwadinata et al., 2024):

- 1) Pembangunan Infrastruktur: Membangun fasilitas dasar dan publik.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi: Mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi warga desa.
- 4) Ketahanan Pangan: Mengalokasikan dana untuk mendukung program yang berkaitan dengan ketahanan pangan di desa, sesuai dengan kebijakan prioritas yang berlaku.

2.1.6 Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang proses penyalurannya dilakukan melalui APBD kabupaten/kota (Hardianto & Desa, 2022). Dana ini dialokasikan untuk membiayai empat pilar kegiatan utama di desa: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dan memajukan desa

agar menjadi entitas yang kuat, mandiri, maju, dan demokratis, sekaligus mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dana desa digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas ditingkat desa, berikut mengenai penjelasannya:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: membiayai kegiatan operasional dan administratif pemerintah desa.
- 2) Pembangunan Desa: terkait dengan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan fisik di desa.
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan: Anggaran dana desa dipergunakan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial, serta budaya dan pelayanan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa: mendorong peningkatan keswadayaan, gotong-toyong, dan pendapatan masyarakat melalui BUMDES.

Penggunaan Dana Desa harus berpegang pada tiga prinsip utama:

- a) Perencanaan Terpadu: Alokasi dana harus didasarkan pada program dan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan diresmikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
- b) Prioritas Fleksibel: Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mendukung isu-isu strategis, seperti upaya pemulihan ekonomi nasional, penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- c) Akuntabilitas Menyeluruh: Setiap rupiah yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Pengawasan ketat juga harus dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dan kinerja yang optimal.

2.1.7 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara spesifik disalurkan ke daerah (Sisilia & Harsono, 2021). Tujuannya adalah untuk membiayai program-program daerah yang sifatnya khusus dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. DAK terbagi menjadi dua jenis:

- 1) DAK Fisik: Digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
- 2) DAK Nonfisik: Dialokasikan untuk mendukung operasional layanan publik.

DAK memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut.

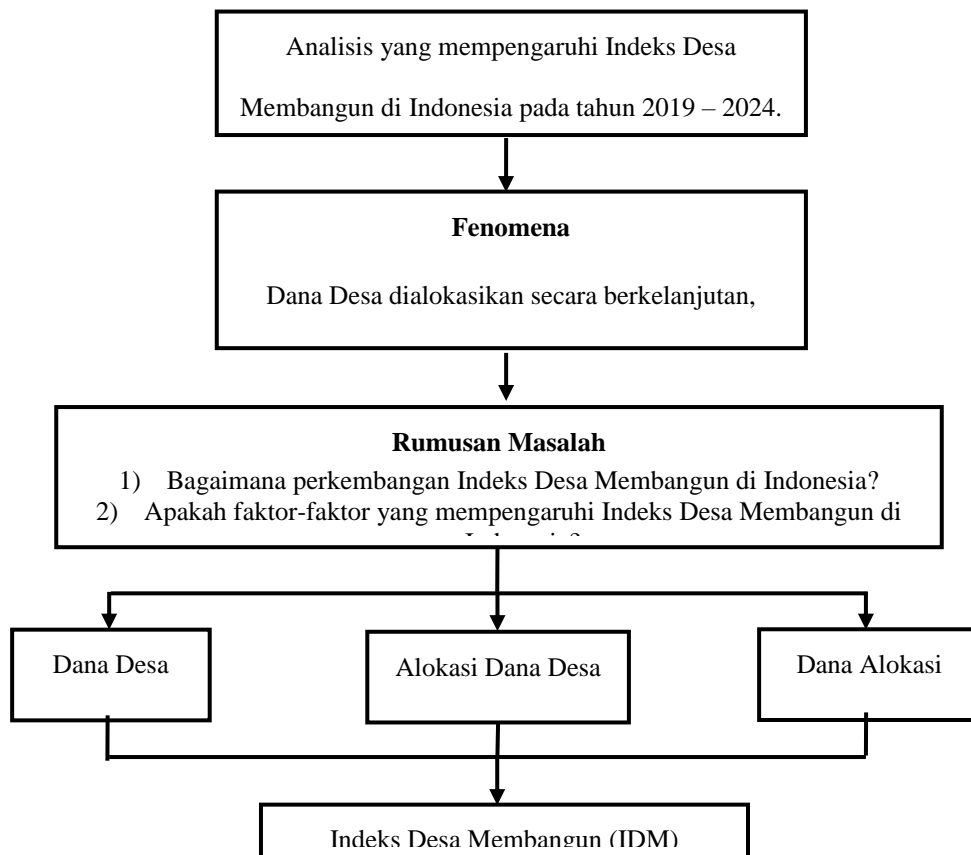
- 1) Mendukung Prioritas Daerah: DAK dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan spesifik (baik fisik maupun nonfisik) yang merupakan bagian dari urusan dan prioritas pembangunan di daerah tersebut.
- 2) Memperkuat Layanan Publik: DAK Nonfisik secara khusus berperan penting dalam mendukung operasional layanan publik, contohnya melalui alokasi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- 3) Mendorong Ekonomi Lokal: DAK Fisik berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan belanja modal daerah, yang pada akhirnya memberikan dampak stimulatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Jumlah alokasi DAK yang akan diterima oleh setiap daerah ditetapkan secara resmi oleh Menteri Keuangan. Proses penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan memindahkan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pencairan ini hanya bisa dilakukan

setelah pemerintah daerah berhasil memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berpikir konseptual merupakan gambaran terkait representasi tulisan atau visual yang menjelaskan mengenai alur pemikiran dan hubungan logis antar konsep variabel yang disertai dengan latar belakang dialndasi oleh tujuan teori, dan variabel penelitian (Sugiyono, 2018). Tujuan dari kerangka berpikir konseptual adalah untuk mengorganisir ide, memecahkan masalah, merumuskan hipotesis atau pertanyaan, serta memberikan gambaran asumsi terkait variabel penelitian secara felksbel dan kreatif. Berikut gambaran kerangka pikir konseptual pada penelitian ini, dijelaskan oleh Gambar 2.1:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan gambar kerangka pikir konseptual diatas, menjelaskan bahwa permasalahan terkait pembangunan desa masih menjadi konsentrasi dari pemerintah, dikarenakan masih terdapat desa tertinggal yang ada di Indonesia. Pengukuran bahwa desa sudah sejahtera atau masih dalam kategori tertinggal dapat tercermin dari indeks pembangunan manusia dan indeks desa membangun, namun di tahun 2019 untuk indeks yang digunakan adalah indeks desa membangun. Berdasarkan indeks desa membangun ditahun 2019 – 2024 pada 34 provinsi yang ada di Indonesia ada beberapa aspek yang mempengaruhi indeks desa membangun yakni dana desa, anggaran dana desa, dan dana alokasi khusus.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut, dapat diringkas dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	“Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur”	Regresi Data Panel	Variabel yang digunakan pada penelitian ini mencakup dimensi kinerja pengelolaan dana desa, seperti presentase penyaluran, presentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyaluran dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Namun, persentase penyerapan dana desa dan kecepatan penyaluran dana desa, dengan lag

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
	(Halim & Taryani, 2023)		penyerapan, dan kecepatan penyaluran yang digunakan sebagai variabel penjelas, serta indeks desa membangun sebagai variabel dependen.	waktu dua dan tiga tahun, memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM.
2.	<p>“Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung Timur”</p> <p>(Elfahdi et al., 2021)</p>	<p>Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode two ways anova, analisis regresi linier, dan analisis multivariat (Principal Component Analysis dan Hierarchical</p>	<p>Dana desa dan indeks ketahanan ekonomi sebagai variabel independen serta indek desa membangun sebagai variabel dependen</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Ekonomi menjadi indeks komposit dengan nilai terendah dari penghitungan Indeks Desa Membangun Tahun 2020. Penyusun Indeks Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari 6 (enam) dimensi baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Ketahanan Ekonomi dan perdagangan</p>

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
		Cluster Analysis).		merupakan dimensi dengan pengaruh terbesar (34,23%). Dana desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun dan desa yang memiliki pagu dana desa yang sama belum tentu menghasilkan status desa yang sama
3.	<p>“Analisis Pendapatan Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara”</p> <p>(Sandag et al., 2022)</p>	Analisis Regresi Data Panel	<p>Penelitian menggunakan variabel penelitian pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa sebagai variabel independen, serta indeks desa membangun sebagai variabel dependen.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah:1) Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. 2)Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. 3) Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan</p>

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. 4) Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara.</p>
4.	<p>“Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara”</p> <p>(Arina et al., 2021)</p>	<p>Analisis Regresi Data Panel</p>	<p>Penelitian menggunakan variable penelitian berupa dana desa dan alokasi dana desa sebagai variabel independen serta indeks desa membangun sebagai variabel dependen.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara Simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara, (2) Secara parsial Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa</p>

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
				Tenggara dan (3) Secara parsial Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
5.	<p>“Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019-2023”</p> <p>(Parnomo & Utami, 2024)</p>	Analisis Regresi Data Panel	Variabel yang digunakan pada penelitian meliputi alokasi dana desa, dana desa, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen serta indeks desa membangun sebagai variabel dependen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dan variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap indeks desa membangun di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli desa pada desa-desa dalam selang tahun 2019-2023.
6.	<p>“ <i>The Effect of Village Fund Allocation on the Developing Village Index in East Sumba Regency</i>”</p> <p>(Mone et al., 2024)</p>	Penelitian menggunakan regresi data panel	Penelitian menggunakan variabel alokasi dana desa sebagai variabel independen dan indeks desa membangun sebagai variabel dependen.	Hasil penelitian menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap indek desa membangun di East Sumba Regency.
7.	<p>“Pengaruh Transfer Pusat dan Daerah Kepada Desa terhadap Status Indeks Desa Membangun</p>	Metode analisis data yang digunakan pada penelitian adalah regresi linier	Penelitian menggunakan variabel dana desa, alokasi dana desa, serta pajak dan retribusi bagi hasil sebagai	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan dana desa, alokasi dana desa, dan BHPRD berpengaruh signifikan terhadap perubahan angka IDM. Variabel-

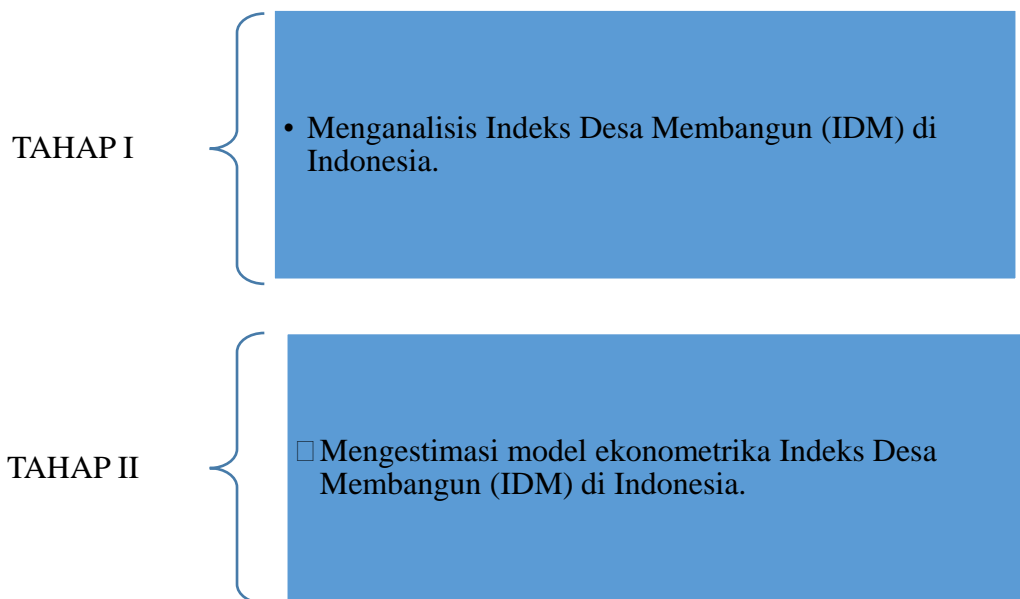
No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
	di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang” (Seliman, 2023)	berganda.	variabel independen serta indeks desa membangun sebagai variabel dependen.	variabel ini juga secara abersama-sama terkointegrasi menciptakan pergerakan menuju keseimbangan dalam jangka panjang. Secara parsial dana desa berpengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun, namun alokasi dana desa dan BHPRD tidak berpengaruh terhadap indeks desa membangun.
8.	“Pengaruh Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Barabai” (Rezkia &	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel.	Variabel penelitian yang digunakan adalah dana desa dan pembangunan infrastruktur sebagai variabel independen serta indeks desa membangun sebagai variabel dependen.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara simultan Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun, (2) Pembangunan Infrastruktur

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
	Yunani, 2023)			merupakan variabel paling berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun namun pengaruhnya bersifat negatif, dan (3) langkah langkah untuk meningkatkan indeks desa membangun adalah dengan memperkuat musyawarah desa serta meningkatkan pengembangan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan rekomendasi hasil inputan kuisisioner indeks desa membangun pada tahun sebelumnya.

2.4. Kerangka Penelitian

2.4.1 Tahap Penelitian

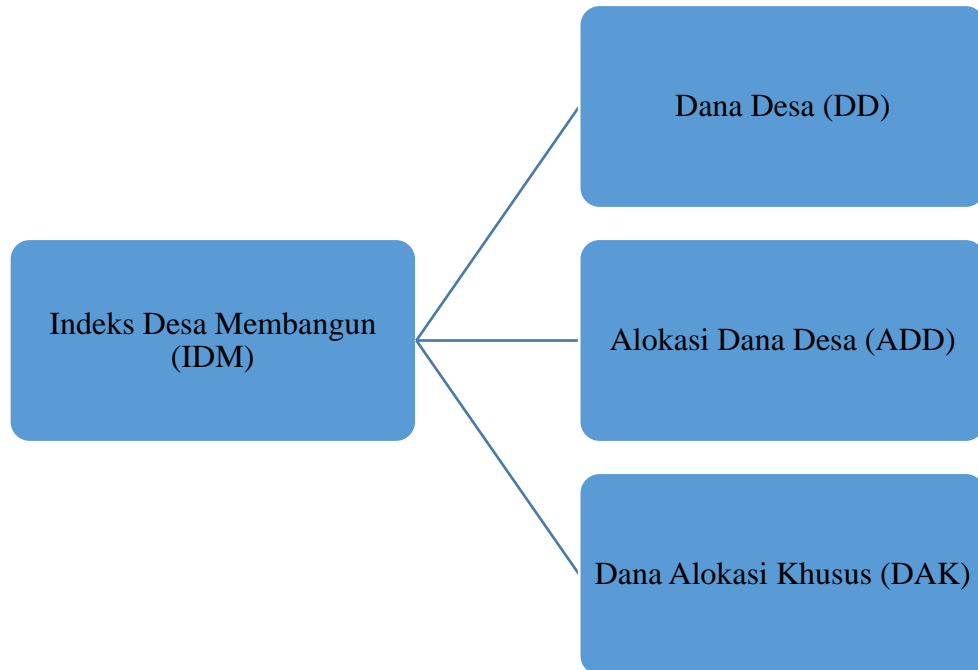
Sejumlah indikator yang dianggap dapat memengaruhi perkembangan desa di Indonesia meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga instrumen fiskal tersebut dipandang sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa. Setelah dilakukan proses estimasi, analisis akan difokuskan pada efektivitas kebijakan fiskal desa dalam mempercepat peningkatan status desa dari kategori tertinggal dan berkembang menuju desa maju dan mandiri.



2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian

Gambar 2. 2 Bagan Konseptual Model

2.5. Model Kerangka Teoritis Model Analisis Yang Mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM)



Gambar 2. 3 Kerangka Teoritis Model Ekonometrika

Dalam model diatas, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan variabel terikat.

2.6. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu maka adapun hipotesis dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengaruh dari Dana Desa (DD) terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia periode 2015-2024.
- 2) Terdapat pengaruh dari Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia periode 2015-2024.

- 3) Terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia periode 2015-2024.
- 4) Terdapat pengaruh secara simultan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia periode 2015-2024.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengolahan data berupa angka-angka yang nantinya dapat ditarik ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang ditujukan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan dana desa yang meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian desa yang tercermin dalam nilai IDM di 34 provinsi di Indonesia periode 2015-2024. Data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini mencakup segala data sekunder yang dapat memperkuat penelitian serta merepresentasikan variabel-variabel penelitian secara akurat

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penetapan makna pada suatu variabel dalam penelitian yang memuat mengenai spesifikasi kegiatan yang diperlukan untuk mengukur dan mengkategorisasikan variabel tersebut (Sugiyono, 2018). Definisi operasional tergantung pada masing –masing konteks variabel dalam penelitian. Pada penelitian ini terdapat empat variabel yang diteliti yakni dana desa, alokasi dana desa, dana alokasi khusus dan indeks desa membangun. Berdasarkan

definisi tersebut, definisi operasional pada penelitian ini dapat diringkas dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Indeks Desa Membangun (IDM) variabel terikat	Tingkat pengukuran kemajuan desa dalam satuan persen.	Variabel Terikat	https://www.kemendesa.go.id/
Dana Desa (DD) variabel bebas	Dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan desa dalam satuan rupiah	Variabel Bebas	https://www.kemenkeu.go.id/
Alokasi Dana Desa (ADD) variabel bebas	Dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk kegiatan desa dalam satuan rupiah	Variabel Bebas	https://www.kemenkeu.go.id/
Dana Alokasi Khusus (DAK) variabel bebas	Alokasi dana yang bersumber dari APBN kepada wilayah tertentu dalam satuan rupiah	Variabel Bebas	https://www.kemenkeu.go.id/

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tidak lepas dari adanya objek yang diteliti, objek pada penelitian berkaitan dengan tempat dan waktu penelitian. Berikut penjelasan mengenai tempat dan waktu pada penelitian ini:

3.3.1 Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, dengan fokus pada seluruh provinsi yang menjadi objek pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).

Data yang digunakan mencakup periode tahun 2019 hingga 2024, sesuai dengan ketersediaan data resmi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.3.2 Waktu penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan selama 6 bulan yaitu pada bulan Oktober sampai Maret 2026.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Waktu Penelitian ini direncanakan selama 6 bulan yaitu pada bulan Oktober sampai Maret 2026.

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka.

3.4.2 Sumber Data

Data diperoleh dari tahun 2015-2024 yang merupakan data *time series*. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dengan mengumpulkan beberapa data dan informasi dalam penelitian ini yang berasal dari hasil publikasi oleh Kementerian Desa (<https://www.kemendes.go.id/>) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/>) dan baik melalui website resmi maupun pengambilan langsung ke Pojok Statistik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Serta penelitian kepustakaan (library research) yang juga dilakukan melalui Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), baik dengan secara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, majalah, dan artikel.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Indeks

Desa Membangun di Indonesia.

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa.

3.6.2 Analisis Estimasi Model Ekonometrik Tentang Indeks Desa

Membangun di Indonesia.

Model ekonometrik dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur dan menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen secara empiris. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data cross-section yang mencakup 34 provinsi di Indonesia dan data time series selama periode tahun 2015-2024. Penggunaan data panel memungkinkan analisis yang lebih komprehensif karena dapat menangkap variasi antar wilayah sekaligus perubahan antar waktu.

Berdasarkan hal tersebut, model estimasi disusun dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 ADD_{it} + \beta_3 DAK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- IDM_{it} : Indeks Desa Membangun pada provinsi i tahun t
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus terhadap IDM
- DD_{it} : Dana Desa pada provinsi (i) tahun (t)
- ADD_{it} : Alokasi Dana Desa pada provinsi (i) tahun (t)
- DAK_{it} : Dana Alokasi Khusus pada provinsi (i) tahun (t)
- i : *Unit cross-section* (34 provinsi di Indonesia)
- t : Periode waktu penelitian (2015-2024)
- e_{it} : *Error of term*

Dalam estimasi data panel, terdapat tiga pendekatan model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

3.6.2.1 Metode Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Liniear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

- 1) Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
- 2) Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
- 3) Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

Dalam praktiknya, sangat mungkin sekali satu atau lebih asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian estimator OLS tidak lagi BLUE. Pada kasus yang ekstrem, estimator dan/atau pengujian hipotesis bahkan tidak dapat dilakukan. Dalam bagian ini akan dibahas suatu pelanggaran asumsi klasik yang sering terjadi yakni autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas (Ariefianto, 2012).

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian merupakan analisis statistik yang digunakan pada model regresi linier data panel untuk mengetahui apakah terhadap

korelasi antar variabel yang terkait dengan perubahan waktu. Pada uji autokorelasi digunakan untuk memastikan bahwa model prediksi tidak terikat oleh runtut waktu sehingga berkorelasi dengan variabel itu sendiri. Terjadi atau tidaknya autokorelasi pada model regresi data panel dapat diukur menggunakan durbin watson dengan membandingkan antara nilai durbin watson dengan nilai DU, DL, dan DW. Berikut kriterianya:

- a. Apabila nilai $DW > DU$ dan nilai $(4-DW) > DU$ maka dinyatakan tidak ada masalah autokorelasi baik positif maupun negatif,
- b. Apabila nilai Durbin watson tidak sesuai dengan kriteria pertama maka data terkena autokorelasi.

2. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n * R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi apabila variabel bebas saling berkorelasi secara kuat, baik secara sempurna maupun mendekati sempurna. Kondisi ini dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak efisien, standar error meningkat, serta hasil uji parsial (uji t) menjadi tidak reliabel meskipun secara teoritis variabel tersebut berpengaruh. Oleh karena itu, pengujian multikolinearitas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan metode *auxiliary regression*, yaitu dengan meregresikan masing-masing variabel independen terhadap variabel independen lainnya. Model utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 ADD_{it} + \beta_3 DAK_{it} + e_{it}$$

Dari masing-masing regresi auxiliary tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2_{aux}). Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai R^2 dari regresi utama lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 regresi auxiliary, maka model dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 regresi auxiliary tinggi atau mendekati satu, maka terdapat indikasi multikolinearitas dalam model. Dengan demikian, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa variabel independen dalam penelitian tidak saling berkorelasi secara kuat sehingga estimasi parameter yang dihasilkan bersifat konsisten dan efisien.

3.6.2.2 Metode Estimasi

Dalam mengestimasi parameter model data panel pada penelitian ini, terdapat tiga metode pendekatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan

koefisien regresi yang akurat. Pemilihan metode ini sangat bergantung pada asumsi yang digunakan mengenai intersep, kemiringan (*slope*), dan variabel gangguan (*error term*). Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan ini merupakan teknik estimasi yang paling sederhana karena menggabungkan data *cross-section* dan *time-series* tanpa memperhatikan perbedaan dimensi ruang dan waktu. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* dengan asumsi bahwa perilaku data antar provinsi di Indonesia selama periode 2015-2024 adalah sama.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Metode ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antar wilayah (provinsi) yang merepresentasikan karakteristik spesifik masing-masing daerah, namun intersep tersebut tetap konstan antar waktu. Perbedaan ini muncul karena adanya variabel yang tidak masuk dalam model namun mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM). Estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

c. *Random Effect Model (REM)*

Metode ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Berbeda dengan *Fixed Effect*, dalam metode ini perbedaan intersep diakomodasi oleh *error term* masing-masing perusahaan/wilayah. Keuntungan menggunakan metode ini adalah dapat menghemat derajat bebas (*degree of freedom*) karena tidak perlu menggunakan variabel *dummy*. Untuk memastikan metode mana yang paling relevan dan efisien dalam menjelaskan pengaruh Dana Desa, ADD, dan DAK terhadap IDM di

Indonesia, maka penelitian ini akan melakukan serangkaian prosedur pemilihan model melalui uji formal yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*.

3.6.2.3 Tahapan Analisis

a. Korelasi (R)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai $+1$. Nilai $r = -1$ atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap p variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau adjusted R^2 (Kuncoro, 2018).

c. Pengujian Hipotesis

- 1) Uji Parsial (uji t)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Perumusan hipotesis dalam uji parsial adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya masing-masing variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

$H_a : \beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0, \beta_3 \neq 0$, artinya masing-masing variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

Secara statistik, nilai uji t dapat dirumuskan sebagai berikut:

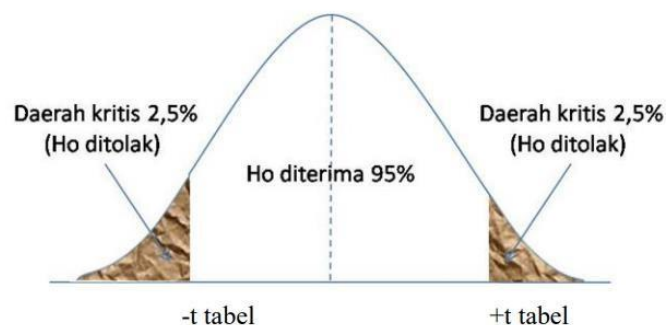
$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Dimana:

β_i = koefisien regresi variabel independen ke-i

$Se(\beta_i)$ = standar error koefisien regresi

i = variabel independen (DD, ADD, DAK)



Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas (p-value) $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IDM.
- Jika nilai probabilitas (p-value) $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Perumusan hipotesis dalam uji simultan adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

Secara statistik, nilai uji F dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana:

R^2 =koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah observasi

α = tingkat signifikansi (5%)

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas (Prob F-statistic) $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak, yang berarti seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IDM.
- Jika nilai probabilitas (Prob F-statistic) $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM.
- Kesimpulan

Dengan demikian, pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F dilakukan untuk memastikan pengaruh variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Desa Membangun, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa di Indonesia. IDM digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Sebagai negara dengan jumlah desa yang besar, perkembangan IDM menjadi cerminan keberhasilan pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan IDM yang terus meningkat menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas pembangunan desa di Indonesia.

Perkembangan IDM di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Faktor-faktor tersebut meliputi kebijakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta dukungan Dana Alokasi Khusus yang berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan IDM sangat penting untuk melihat arah pembangunan desa serta mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang telah diterapkan dalam mendorong kemandirian desa.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, perkembangan status desa di Indonesia menunjukkan tren yang positif meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Berdasarkan data Kementerian Desa, jumlah desa mandiri dan desa maju mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sementara jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pembangunan desa, meskipun jumlah desa dengan status berkembang masih mendominasi secara nasional. Berikut ini perkembangan status Indeks Desa Membangun di Indonesia pada tahun 2015-2024.

Tabel 4.1 Indeks Desa Membangun di Indonesia Tahun 2015–2024 (Jumlah Desa)

Status Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	2.894	4.000	5.000	5.606	848	1.741	3.269	6.238	11.456	17.203
Maju	13.453	16.000	17.000	18.000	8.608	9.071	15.321	20.249	23.035	23.063
Berkembang	52.000	51.000	50.000	55.369	38.276	38.083	38.083	33.902	28.766	24.532
Tertinggal	17.000	16.500	15.000	14.461	17.633	19.145	12.635	9.584	7.154	6.100
Sangat Tertinggal	9.000	8.500	7.500	7.000	6.549	6.220	5.649	4.982	4.850	4.363
Total Desa	71.347	72.000	72.500	74.436	71.914	74.260	74.957	74.955	75.261	75.261

Sumber: Kementerian Desa (2025)

Meskipun perkembangan status Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia telah menunjukkan tren positif yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga momentum kemandirian desa tersebut. Salah satu tantangan utama adalah masih mendominasinya jumlah desa dengan kategori "Berkembang" secara nasional dibandingkan dengan kategori "Maju" atau "Mandiri". Pada tahun 2024, meskipun

jumlah Desa Mandiri telah melonjak tajam menjadi 17.203 desa, namun terdapat sebanyak 24.532 desa yang masih berstatus berkembang. Fluktuasi kondisi ekonomi makro dan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat lokal dapat berdampak signifikan pada keberlanjutan peningkatan status desa ini, sehingga berpotensi menghambat akselerasi pembangunan menuju desa mandiri seutuhnya.

Selain itu, kualitas infrastruktur dan aksesibilitas yang masih belum merata di seluruh wilayah perdesaan Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil, dapat menghambat mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan biaya logistik yang harus ditanggung oleh masyarakat desa. Hal ini berdampak langsung pada dimensi Ketahanan Ekonomi dalam IDM, di mana akses pasar dan kelancaran distribusi produk unggulan desa menjadi kurang optimal. Kondisi infrastruktur yang belum memadai ini sering kali menyebabkan potensi ekonomi lokal, seperti di sektor pertanian dan UMKM, tidak dapat berkembang secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Tantangan lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa yang masih perlu ditingkatkan agar mampu mengelola potensi desa secara mandiri. Meskipun alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terus meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2024 masing-masing mencapai Rp71 triliun dan Rp38 triliun, namun tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian perangkat serta masyarakat desa masih belum optimal dalam mengelola dana yang besar tersebut. Kesenjangan kapasitas manajerial ini dapat menghambat kemampuan desa untuk berinovasi dan bersaing di era ekonomi digital, sehingga

efektivitas penggunaan dana transfer pusat sering kali hanya terjebak pada beban administratif tanpa memberikan dampak transformasi ekonomi yang nyata.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada melalui penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan pemberdayaan masyarakat, Indonesia diharapkan dapat mencapai peningkatan status IDM yang lebih merata dan berkualitas di seluruh provinsi dalam beberapa tahun mendatang. Keberhasilan dalam mendorong transformasi desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan cita-cita otonomi desa di mana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama yang berdaulat dalam menentukan arah kemajuannya sendiri.

Tabel 4. 2 Indeks Desa Membangun (IDM) Menurut Dana Desa (DD) di Indonesia Tahun 2015–2024

Tahun	Rata-rata IDM	Total Dana Desa (DD) (Triliun Rupiah)
2015	0,531	20,67
2016	0,548	46,98
2017	0,565	60,00
2018	0,581	60,00
2019	0,598	70,00
2020	0,615	71,19
2021	0,642	72,00
2022	0,672	68,00

Tahun	Rata-rata IDM	Total Dana Desa (DD) (Triliun Rupiah)
2023	0,705	70,00
2024	0,732	71,00

Sumber: Kementerian Desa & Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Tabel 4.2, perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, khususnya pada kategori Desa Mandiri dan Desa Maju selama periode 2015-2024. Jumlah Desa Mandiri meningkat drastis dari 848 desa pada tahun 2019 menjadi 17.203 desa pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya transformasi struktural pembangunan desa yang didukung oleh kebijakan fiskal melalui Dana Desa (DD).

Pada tahun 2019 hingga 2021, Dana Desa mengalami peningkatan dari Rp70 triliun menjadi Rp72 triliun. Sejalan dengan peningkatan tersebut, jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara alokasi Dana Desa dan peningkatan status IDM. Dana Desa yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan sosial berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi desa.

Meskipun pada tahun 2022 Dana Desa mengalami penurunan menjadi Rp68 triliun akibat penyesuaian kebijakan fiskal nasional, tren peningkatan status desa tetap berlanjut. Jumlah Desa Mandiri meningkat dari 3.269 desa pada tahun 2021 menjadi 6.238 desa pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Dana Desa bersifat kumulatif dan berkelanjutan, sehingga hasil pembangunan

tidak hanya bergantung pada besaran anggaran tahun berjalan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dana di tingkat desa.

Sementara itu, jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan yang konsisten selama periode penelitian. Desa Tertinggal menurun dari 17.633 desa pada tahun 2019 menjadi 6.100 desa pada tahun 2024, sedangkan Desa Sangat Tertinggal turun dari 6.549 desa menjadi 4.363 desa pada periode yang sama. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan Dana Desa dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah serta mempercepat peningkatan kapasitas desa.

Namun demikian, kategori Desa Berkembang masih mendominasi secara nasional meskipun jumlahnya terus menurun dari 38.276 desa pada tahun 2019 menjadi 24.532 desa pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat desa yang berada pada tahap transisi menuju status Maju dan Mandiri. Tantangan yang dihadapi meliputi kapasitas manajemen pemerintahan desa, kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Dengan demikian, Dana Desa memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam mendorong peningkatan status IDM di Indonesia. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, penguatan pengawasan, serta optimalisasi program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi faktor penting agar transformasi Desa Berkembang menuju Desa Maju dan Mandiri dapat berlangsung lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) tidak terlepas dari peran inovasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi di tingkat desa. Transformasi digital dalam administrasi pemerintahan desa, seperti penggunaan

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan pelaporan berbasis online, telah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Digitalisasi ini mendorong efisiensi perencanaan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat desa (Kementerian Desa, 2023). Dengan tata kelola yang lebih baik, desa mampu mengalokasikan Dana Desa secara lebih tepat sasaran pada indikator-indikator pembentuk IDM, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.

Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan dimensi ketahanan ekonomi desa. Banyak desa mulai mengembangkan unit usaha produktif seperti pengelolaan wisata desa, pertanian terpadu, serta usaha perdagangan berbasis potensi lokal. Optimalisasi Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes terbukti mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kondisi ini berkontribusi terhadap percepatan perubahan status desa dari Berkembang menjadi Maju, bahkan Mandiri (Kementerian Keuangan, 2023).

Namun demikian, tantangan dalam peningkatan IDM masih cukup kompleks. Tidak semua desa memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan. Keterbatasan kompetensi aparatur desa seringkali menyebabkan penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya berbasis kebutuhan prioritas dan data IDM. Akibatnya, peningkatan skor pada beberapa indikator berjalan lebih lambat dibandingkan desa-desa yang memiliki kapasitas kelembagaan lebih kuat (BPS, 2023).

Di sisi lain, kebijakan afirmatif pemerintah melalui skema Dana Desa berbasis kinerja mulai memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis dan kondisi sosial ekonomi mampu memperkecil kesenjangan antarwilayah. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal secara konsisten selama periode 2015-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2. Penurunan tersebut mencerminkan efektivitas intervensi fiskal dalam mendorong pemerataan pembangunan desa (Kementerian Desa, 2024).

Dimensi ketahanan sosial juga mengalami penguatan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan sarana kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Program padat karya tunai desa yang digulirkan sejak masa pandemi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat desa. Peningkatan akses terhadap layanan dasar tersebut berkontribusi terhadap peningkatan skor IDM secara agregat, khususnya pada indikator pelayanan sosial dasar (Kementerian Keuangan, 2022).

Meskipun tren peningkatan IDM menunjukkan hasil yang positif, keberlanjutan pembangunan desa tetap memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pengawasan yang efektif, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor kunci agar Dana Desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, Dana Desa diharapkan mampu menjadi instrumen

utama dalam mempercepat transformasi desa menuju kategori Mandiri secara merata di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, perkembangan IDM periode 2015-2024 menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa memiliki hubungan yang signifikan terhadap peningkatan status desa di Indonesia. Namun, optimalisasi kualitas belanja desa dan penguatan kelembagaan lokal tetap menjadi agenda penting agar peningkatan tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional berbasis desa.

Kebijakan Dana Desa (DD) diharapkan dapat terus berkembang dengan dukungan tata kelola yang transparan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Hal ini akan berkontribusi secara signifikan pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di 34 provinsi di Indonesia melalui penguatan dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Secara keseluruhan, analisis perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, meskipun tantangan terkait disparitas antarwilayah tetap ada. Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi instrumen fiskal utama dalam mendukung kemandirian desa. Meskipun desa berstatus "Berkembang" masih mendominasi, sinergi kebijakan yang tepat terbukti mampu meningkatkan jumlah desa dengan status "Maju" dan "Mandiri" setiap tahunnya.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat desa dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran tidak dapat diabaikan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat sasaran dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk

mencapai kemandirian ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan di masa depan.

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran penting dalam mendukung operasional pemerintahan desa sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Berbeda dengan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, ADD berasal dari APBD kabupaten/kota dan diarahkan untuk mendukung fungsi administratif desa, termasuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa, serta pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya ADD, desa memiliki ruang fiskal tambahan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel 4. 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia Tahun 2015–2024

Tahun	Rata-rata IDM Nasional	Total ADD Nasional (Triliun Rupiah)
2015	0,531	21,65
2016	0,548	26,20
2017	0,565	29,85
2018	0,581	31,05
2019	0,598	32,50
2020	0,615	33,41
2021	0,642	34,45
2022	0,672	34,70
2023	0,705	36,90
2024	0,732	38,00

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Kementerian Keuangan

Tabel 4.3 menunjukkan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia periode 2015-2024 yang diiringi dengan alokasi Dana Desa (DD) setiap

tahunnya. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan rata-rata skor IDM nasional dari 0,623 pada tahun 2019 menjadi 0,724 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan desa yang menjadi indikator utama dalam penghitungan IDM.

Sejalan dengan peningkatan skor tersebut, jumlah Desa Mandiri mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dari 848 desa pada tahun 2019 menjadi 17.203 desa pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas kebijakan Dana Desa sebagai instrumen fiskal yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa. Dana Desa yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal terbukti mampu mendorong desa-desa berkembang naik status menjadi Maju dan Mandiri (Kementerian Desa, 2024).

Selain peningkatan Desa Mandiri, jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan yang konsisten. Desa Tertinggal berkurang dari 17.633 desa pada tahun 2019 menjadi 6.100 desa pada tahun 2024, sementara Desa Sangat Tertinggal menurun dari 6.549 desa menjadi 4.363 desa pada periode yang sama. Penurunan ini menunjukkan bahwa intervensi Dana Desa memiliki dampak nyata dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2023).

Meskipun Dana Desa sempat mengalami penyesuaian anggaran pada tahun 2022 menjadi Rp68 triliun, tren peningkatan IDM tetap berlanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besaran

anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan partisipatif dalam musyawarah desa dan pemanfaatan data IDM sebagai dasar perencanaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan tersebut (BPS, 2023).

Ke depan, peningkatan IDM di Indonesia diharapkan dapat terus berlanjut dengan penguatan kualitas belanja Dana Desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengawasan yang lebih akuntabel. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi kunci untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi desa menuju kemandirian dan daya saing yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, perkembangan IDM periode 2015-2024 menunjukkan prospek yang positif bagi pembangunan desa di Indonesia. Namun, tantangan dalam aspek kualitas sumber daya manusia, inovasi ekonomi lokal, serta pemerataan antarwilayah tetap perlu menjadi perhatian agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Dalam konteks pembangunan desa, penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan status administratif desa, tetapi juga memperhatikan kualitas pembangunan pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi instrumen yang komprehensif dalam mengukur capaian tersebut. Oleh karena itu, dukungan fiskal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran strategis

dalam mempercepat peningkatan indikator-indikator penyusun IDM, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.

DAK yang dialokasikan kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, termasuk pembangunan infrastruktur perdesaan. Intervensi melalui DAK fisik seperti pembangunan jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, dan puskesmas pembantu secara tidak langsung meningkatkan skor ketahanan sosial dan lingkungan dalam penghitungan IDM. Dengan demikian, peningkatan alokasi DAK berpotensi mempercepat perubahan status desa dari Tertinggal menjadi Berkembang, bahkan Maju.

Pemerintah melalui sinergi berbagai instrumen fiskal berupaya menciptakan pemerataan pembangunan yang inklusif agar desa dapat mengelola potensi lokalnya secara mandiri. Dengan memperkuat dimensi ketahanan ekologi melalui mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan di masa depan. Hal ini sejalan dengan kerangka pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam Indeks Desa Membangun untuk menyejahterakan kehidupan warga tanpa merusak ekosistem lingkungan.

Berikut tabel data perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan status IDM di Indonesia periode 2015-2024.

Tabel 4. 4 Indeks Desa Membangun (IDM) menurut Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia Tahun 2015–2024

Tahun	Rata-rata IDM Nasional	Total DAK Nasional (Triliun Rupiah)
-------	------------------------	-------------------------------------

Tahun	Rata-rata IDM Nasional	Total DAK Nasional (Triliun Rupiah)
2015	0,531	58,2
2016	0,548	89,8
2017	0,565	174,2
2018	0,581	185,4
2019	0,598	179,0
2020	0,615	175,2
2021	0,642	180,5
2022	0,672	191,1
2023	0,705	183,7
2024	0,732	187,6

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kementerian

Desa PDTT.

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara nasional mengalami fluktuasi selama periode 2015-2024, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp191,1 triliun. Pada periode yang sama, jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju menunjukkan peningkatan yang signifikan. Desa Mandiri meningkat dari 848 desa pada tahun 2019 menjadi 17.203 desa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah melalui DAK berkontribusi terhadap percepatan pembangunan desa, khususnya pada aspek infrastruktur dan pelayanan dasar.

Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan alokasi DAK menjadi Rp175,2 triliun akibat penyesuaian kebijakan fiskal nasional, tren peningkatan status desa tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak pembangunan yang didanai DAK bersifat jangka menengah dan berkelanjutan.

Infrastruktur yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan meningkatkan skor IDM pada tahun berikutnya.

Selain itu, penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang cukup konsisten dari tahun ke tahun mencerminkan efektivitas kebijakan transfer ke daerah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Desa Tertinggal menurun dari 17.633 desa pada tahun 2019 menjadi 6.100 desa pada tahun 2024, sedangkan Desa Sangat Tertinggal turun dari 6.549 desa menjadi 4.363 desa pada periode yang sama. Intervensi DAK pada sektor pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam memperbaiki indikator ketahanan sosial desa.

Namun demikian, peningkatan status IDM tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan pengawasan program pembangunan daerah. Tanpa tata kelola yang baik, alokasi DAK yang besar tidak akan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan DAK selaras dengan prioritas pembangunan desa berbasis data IDM.

Secara keseluruhan, perkembangan DAK dan IDM periode 2015-2024 menunjukkan bahwa kebijakan transfer fiskal melalui Dana Alokasi Khusus memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat transformasi desa di Indonesia. Ke depan, penguatan integrasi antara Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan DAK menjadi strategi penting untuk menciptakan pembangunan

desa yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Selain dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), faktor kelembagaan pemerintah daerah juga menjadi elemen penting dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas penggunaan DAK, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi indikator utama dalam dimensi ketahanan sosial dan lingkungan. Apabila perencanaan pembangunan daerah disusun berbasis data IDM, maka intervensi program akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan status desa (Kementerian Desa, 2024).

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas sanitasi merupakan komponen penting dalam mendukung peningkatan skor IDM. Desa yang memiliki akses infrastruktur yang memadai cenderung mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024), peningkatan belanja DAK fisik pada sektor infrastruktur dasar berkontribusi terhadap percepatan penurunan jumlah desa tertinggal secara nasional. Oleh karena itu, konsistensi alokasi DAK pada sektor prioritas menjadi faktor strategis dalam pembangunan desa.

Selain infrastruktur, kualitas sumber daya manusia di desa juga sangat menentukan peningkatan IDM. DAK nonfisik yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan berperan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar masyarakat desa. Desa yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang lebih baik umumnya menunjukkan peningkatan skor

ketahanan sosial secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan berkorelasi positif dengan kenaikan nilai indeks pembangunan desa.

Faktor geografis dan kondisi wilayah juga turut mempengaruhi efektivitas pemanfaatan DAK. Desa-desanya di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan menghadapi tantangan distribusi logistik dan keterbatasan akses yang lebih besar dibandingkan desa di wilayah perkotaan atau dataran rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar alokasi DAK benar-benar mampu menjangkau desa-desa dengan tingkat ketertinggalan tinggi (DJPK, 2024).

ketersediaan infrastruktur desa juga menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai IDM. Desa yang memiliki akses terhadap jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan desa yang infrastrukturnya terbatas. Penelitian oleh Arsjad et al. (2024) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar mampu meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi desa secara signifikan. Oleh karena itu, alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur harus terus ditingkatkan agar desa-desa tertinggal dapat naik kelas menjadi desa berkembang atau bahkan mandiri.

Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Desa yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor, sering kali mengalami hambatan dalam meningkatkan nilai IDM. Data dari BNPB (2023) menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki

sistem mitigasi bencana dan akses terhadap fasilitas lingkungan yang baik mampu menjaga stabilitas pembangunan meskipun menghadapi risiko bencana. Dengan demikian, kebijakan pembangunan desa harus memperhatikan aspek ekologi agar keberlanjutan pembangunan dapat terjamin.

Selain faktor infrastruktur dan lingkungan, aspek sosial ekonomi masyarakat desa juga berpengaruh besar terhadap capaian IDM. Akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan informasi menjadi indikator penting dalam dimensi ketahanan sosial. Menurut penelitian oleh Halim & Taryani (2023), desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam kegiatan sosial dan ekonomi lebih cepat mengalami peningkatan status IDM. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan desa merupakan strategi yang efektif untuk mempercepat transformasi desa.

Terakhir, kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan IDM. Dukungan fiskal yang konsisten dan tepat sasaran dapat membantu desa meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat kelembagaan, serta memperluas akses ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas manajerial perangkat desa dan pengawasan yang ketat. Jika kebijakan tidak diterapkan secara efektif, maka potensi peningkatan IDM tidak akan terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal agar pembangunan desa dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, aspek pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi perhatian penting dalam mendukung peningkatan IDM. Pengelolaan DAK yang tidak efektif dapat menghambat pencapaian target pembangunan desa. Oleh sebab itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator IDM sangat diperlukan agar setiap program yang didanai dapat diukur dampaknya secara nyata terhadap perubahan status desa.

Ke depan, integrasi kebijakan antara Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu terus diperkuat. Ketiga instrumen fiskal tersebut harus saling melengkapi dalam mendorong pembangunan desa yang komprehensif. DD dapat difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan skala desa, ADD mendukung operasional pemerintahan desa, sementara DAK memperkuat infrastruktur dan pelayanan dasar melalui pemerintah daerah. Dengan sinergi yang optimal, peningkatan status IDM di Indonesia diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan merata.

Secara keseluruhan, perkembangan IDM periode 2015-2024 menunjukkan bahwa kebijakan transfer fiskal memiliki peran signifikan dalam mempercepat transformasi desa. Namun demikian, keberlanjutan peningkatan tersebut sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, pembangunan desa di Indonesia diharapkan mampu menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, serta berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Selain dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), faktor kelembagaan pemerintah daerah juga menjadi elemen penting dalam peningkatan

Indeks Desa Membangun (IDM). Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas penggunaan DAK, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi indikator utama dalam dimensi ketahanan sosial dan lingkungan. Apabila perencanaan pembangunan daerah disusun berbasis data IDM, maka intervensi program akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan status desa (Kementerian Desa, 2024).

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas sanitasi merupakan komponen penting dalam mendukung peningkatan skor IDM. Desa yang memiliki akses infrastruktur yang memadai cenderung mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024), peningkatan belanja DAK fisik pada sektor infrastruktur dasar berkontribusi terhadap percepatan penurunan jumlah desa tertinggal secara nasional. Oleh karena itu, konsistensi alokasi DAK pada sektor prioritas menjadi faktor strategis dalam pembangunan desa.

Selain infrastruktur, kualitas sumber daya manusia di desa juga sangat menentukan peningkatan IDM. DAK nonfisik yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan berperan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar masyarakat desa. Desa yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang lebih baik umumnya menunjukkan peningkatan skor ketahanan sosial secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan berkorelasi positif dengan kenaikan nilai indeks pembangunan desa.

Faktor geografis dan kondisi wilayah juga turut mempengaruhi efektivitas pemanfaatan DAK. Desa-desanya di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan menghadapi tantangan distribusi logistik dan keterbatasan akses yang lebih besar dibandingkan desa di wilayah perkotaan atau dataran rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar alokasi DAK benar-benar mampu menjangkau desa-desanya dengan tingkat ketertinggalan tinggi (DJPK, 2024).

ketersediaan infrastruktur desa juga menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai IDM. Desa yang memiliki akses terhadap jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan desa yang infrastrukturnya terbatas. Penelitian oleh Arsjad et al. (2024) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar mampu meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi desa secara signifikan. Oleh karena itu, alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur harus terus ditingkatkan agar desa-desanya tertinggal dapat naik kelas menjadi desa berkembang atau bahkan mandiri.

Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Desa yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor, sering kali mengalami hambatan dalam meningkatkan nilai IDM. Data dari BNPB (2023) menunjukkan bahwa desa-desanya yang memiliki sistem mitigasi bencana dan akses terhadap fasilitas lingkungan yang baik mampu menjaga stabilitas pembangunan meskipun menghadapi risiko bencana. Dengan demikian, kebijakan pembangunan desa harus memperhatikan aspek ekologi agar keberlanjutan pembangunan dapat terjamin.

Selain faktor infrastruktur dan lingkungan, aspek sosial ekonomi masyarakat desa juga berpengaruh besar terhadap capaian IDM. Akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan informasi menjadi indikator penting dalam dimensi ketahanan sosial. Menurut penelitian oleh Halim & Taryani (2023), desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam kegiatan sosial dan ekonomi lebih cepat mengalami peningkatan status IDM. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan desa merupakan strategi yang efektif untuk mempercepat transformasi desa.

Terakhir, kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan IDM. Dukungan fiskal yang konsisten dan tepat sasaran dapat membantu desa meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat kelembagaan, serta memperluas akses ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas manajerial perangkat desa dan pengawasan yang ketat. Jika kebijakan tidak diterapkan secara efektif, maka potensi peningkatan IDM tidak akan terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal agar pembangunan desa dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, aspek pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi perhatian penting dalam mendukung peningkatan IDM. Pengelolaan DAK yang tidak efektif dapat menghambat pencapaian target pembangunan desa. Oleh sebab itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator IDM

sangat diperlukan agar setiap program yang didanai dapat diukur dampaknya secara nyata terhadap perubahan status desa.

4.1.2 Analisis Estimasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks

Desa Membangun Di Indonesia Pada Tahun 2015-2024

Analisis estimasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia selama periode 2015–2024. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software EViews 12, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai hubungan serta besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut, maka model regresi yang dihasilkan dapat dikatakan layak dan memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga hasil estimasi dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana peranan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus dalam mendorong peningkatan Indeks Desa Membangun. Hasil estimasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam pembangunan desa, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

4.1.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data indenpenden data dependen, serta sebandata dan peningkatan maksimum dan minimum dari data. Adapun hasil dari pengujian berikut.

Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif

	IDM	DD	DAK	ADD
Mean	0.618900	60.98400	160.4700	31.87100
Median	0.606500	69.00000	179.7500	32.95500
Maximum	0.732000	72.00000	191.1000	38.00000
Minimum	0.531000	20.67000	58.20000	21.65000
Std. Dev.	0.067581	16.19637	46.47439	4.962769
Skewness	0.376147	-1.738113	-1.546802	-0.822011
Kurtosis	1.908583	4.899791	3.620243	2.875803
Jarque-Bera	0.732141	6.538898	4.147954	1.132598
Probability	0.693454	0.038027	0.125685	0.567622
Sum	6.189000	609.8400	1604.700	318.7100
Sum Sq. Dev.	0.041105	2360.903	19438.82	221.6617
Observations	10	10	10	10

Sumber : E-Views 12, data diolah

Statistika deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum karakteristik suatu data penelitian. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap variabel IDM, Dana Desa (DD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah observasi sebanyak 10 data. Melalui analisis ini, dapat diketahui gambaran umum mengenai nilai rata-rata, tingkat penyebaran data, serta pola distribusi masing-masing variabel selama periode pengamatan.

Berdasarkan hasil output data, variabel IDM memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,618900 dengan nilai maksimum 0,732000 dan minimum 0,531000. Nilai standar deviasi sebesar 0,067581 menunjukkan bahwa tingkat variasi IDM relatif sangat kecil, sehingga data cenderung stabil. Nilai *skewness* sebesar 0,376147 mengindikasikan distribusi yang menceng ke kanan (*positif*),

sedangkan *kurtosis* sebesar 1,908583 menunjukkan distribusi yang bersifat platikurtik (lebih datar dari distribusi normal).

Variabel Dana Desa (DD) memiliki nilai rata-rata sebesar 60,98400 dengan nilai maksimum 72,00000 dan minimum 20,67000. Standar deviasi yang cukup besar, yaitu 16,19637, menunjukkan adanya fluktuasi atau variasi data yang signifikan pada variabel ini. Nilai *skewness* sebesar -1,738113 menunjukkan distribusi menceng ke kiri (negatif) yang cukup tajam, sementara *kurtosis* sebesar 4,899791 menunjukkan distribusi yang bersifat leptokurtik atau memiliki puncak yang lebih runcing dibandingkan distribusi normal.

Selanjutnya, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata sebesar 160,4700 dengan nilai maksimum 191,1000 dan minimum 58,2000. Standar deviasi sebesar 46,47439 menunjukkan bahwa DAK memiliki tingkat variasi yang paling tinggi dibandingkan variabel lainnya dalam tabel ini. Nilai *skewness* sebesar -1,546802 menunjukkan distribusi yang menceng ke kiri, sedangkan *kurtosis* sebesar 3,620243 menunjukkan distribusi yang sedikit lebih runcing dari distribusi normal.

Adapun variabel Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai rata-rata sebesar 31,87100 dengan nilai maksimum 38,00000 dan minimum 21,65000. Standar deviasi sebesar 4,962769 menunjukkan tingkat penyebaran data yang moderat. Nilai *skewness* sebesar -0,822011 menunjukkan kecenderungan menceng ke kiri, sementara *kurtosis* sebesar 2,875803 berada sangat dekat dengan angka 3, yang mengindikasikan bahwa distribusi data variabel ADD mendekati distribusi normal (mesokurtik).

Berdasarkan uji normalitas Jarque-Bera, variabel IDM (probabilitas 0,693454) dan ADD (probabilitas 0,567622) memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan berdistribusi normal. Namun, variabel DD (probabilitas 0,038027) memiliki nilai di bawah 0,05, yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, variabel DAK (probabilitas 0,125685) masih berada di atas ambang batas 0,05 sehingga masih dianggap memenuhi asumsi normalitas. Karakteristik data ini menjadi dasar penting dalam menentukan jenis analisis statistik lanjutan yang tepat untuk digunakan.

4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik

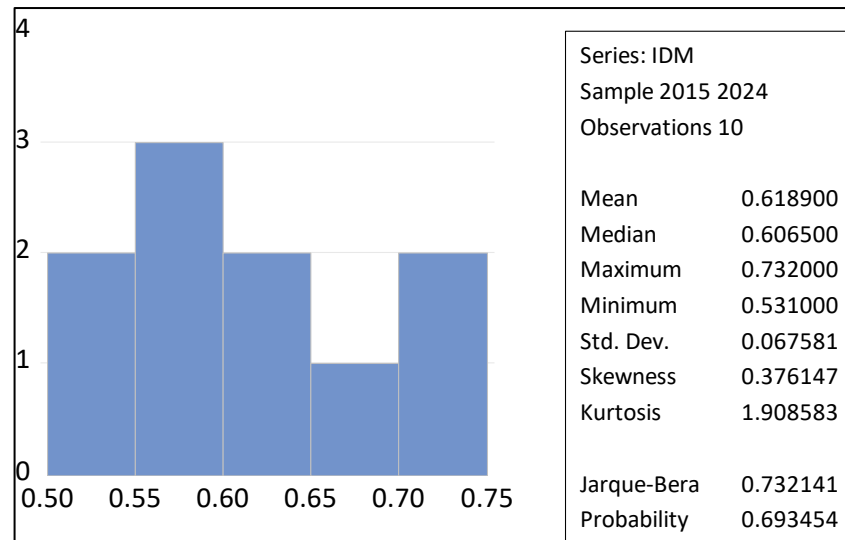
Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Serangkaian pengujian ini bertujuan agar hasil estimasi parameter tidak bias dan memiliki validitas yang kuat untuk menjelaskan pengaruh Dana Desa, ADD, dan DAK terhadap IDM.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya memiliki distribusi normal. Salah satu metode yang digunakan untuk melihat distribusi data adalah uji Jarque-Bera (JB). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data atau residual yang berdistribusi normal.

Dalam software EViews, normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Probability Jarque-Bera $> 0,05$.

Uji JB diperoleh melalui tampilan Histogram Normality pada menu EViews. Setelah diolah menggunakan EViews 12, maka diperoleh hasil sebagai berikut:



Sumber : E-Views 12, data diolah

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel IDM dengan jumlah observasi sebanyak 10 sampel (periode 2015–2024), diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,732141 dengan nilai Probability sebesar 0,693454. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,693454 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data variabel IDM berdistribusi normal.

Selain itu, nilai skewness sebesar 0,376147 menunjukkan bahwa distribusi data sedikit menceng ke kanan, sedangkan nilai kurtosis sebesar 1,908583 yang berada di bawah angka 3 menunjukkan bahwa bentuk distribusi cenderung lebih datar (platikurtik). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas, karena korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi. Akibatnya, koefisien regresi menjadi tidak akurat, standar error membesar, dan hasil pengujian menjadi kurang dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$. Sebaliknya, jika nilai $VIF > 10$, maka mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 03/30/26 Time: 10:53			
Sample: 2015 2024			
Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000560	88.62987	NA
DD	3.05E-07	190.8047	11.38952
ADD	2.13E-06	349.5125	7.464258
DAK	2.57E-08	112.6011	7.903488

Sumber : E-Views 12, data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan EViews, diperoleh nilai Centered VIF untuk masing-masing variabel independen, yaitu variabel DD sebesar 11,38952, variabel ADD sebesar 7,464258, dan variabel DAK sebesar

7,903488. Dari hasil tersebut terlihat bahwa variabel DD memiliki nilai VIF yang sedikit melebihi batas ketentuan ($VIF > 10$), sedangkan variabel ADD dan DAK masih berada di bawah batas ($VIF < 10$).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat indikasi multikolinearitas pada variabel DD, meskipun tidak terlalu kuat. Sementara itu, variabel ADD dan DAK tidak mengalami gejala multikolinearitas. Secara keseluruhan, model masih dapat digunakan, namun perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan pengaruh variabel DD karena adanya indikasi korelasi yang cukup tinggi dengan variabel independen lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas (model yang baik). Namun, jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang memenuhi syarat asumsi klasik adalah model yang terbebas dari gejala heteroskedastisitas agar estimasi parameter tetap efisien dan tidak bias.

Dalam penelitian ini, deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah dengan melihat nilai Prob. Chi-Square pada bagian *ObsR-squared**. Apabila nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($\text{Prob. Chi-Square} > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat dasar analisis heteroskedastisitas sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Uji Hetrokedastisitas dengan Uji White

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.759329	Prob. F(3,6)	0.5565
Obs*R-squared	2.751861	Prob. Chi-Square(3)	0.4315
Scaled explained SS	1.893409	Prob. Chi-Square(3)	0.5948

Sumber : E-Views 12, data diolah

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data menggunakan EViews 12 di atas, diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 2,751861 dengan nilai Prob. Chi-Square(3) sebesar 0,4315. Karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih besar dari 0,05 ($0,4315 > 0,05$), maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa model ini bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hal ini menunjukkan bahwa model telah memenuhi salah satu syarat penting dalam asumsi klasik. Dengan varians residual yang konstan, model regresi ini memiliki validitas yang kuat untuk menjelaskan pengaruh variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) tanpa adanya gangguan dari penyebaran data yang tidak merata.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari autokorelasi, sehingga hasil estimasi parameter menjadi lebih akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test melalui software EViews. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah dengan melihat nilai probabilitas Obs*R-squared. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), maka model dinyatakan tidak mengalami autokorelasi.

Tabel 4. 8 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.630032	Prob. F(2,4)	0.5783
Obs*R-squared	2.395529	Prob. Chi-Square(2)	0.3019

Sumber : E-Views 12, Data diolah.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Prob. Chi-Square (2) pada Obs*R-squared sebesar 0,3019. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,3019 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. Selain itu, nilai Prob. F sebesar 0,5783 juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga semakin memperkuat bahwa model terbebas dari autokorelasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi tidak adanya autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak saling berkorelasi antar waktu, sehingga model telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.1.2.3 Hasil Analisis Regresi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi E-Views 12 untuk melakukan pengolahan data melalui metode regresi linear berganda (Ordinary Least Squares/OLS). Model yang digunakan bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Data yang digunakan mencakup periode tahun 2015–2024 dengan jumlah observasi sebanyak 10.

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen secara bersama-sama.

Tabel 4. 9 Hasil Regresi

Dependent Variable: IDM Method: Least Squares Date: 03/30/26 Time: 11:21 Sample: 2015 2024 Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.058704	0.023668	2.480360	0.0478
DD	-0.003332	0.000552	-6.034797	0.0009
ADD	0.026120	0.001459	17.90448	0.0000
DAK	-0.000430	0.000160	-2.684669	0.0363
R-squared	0.990775	Mean dependent var		0.618900
Adjusted R-squared	0.986162	S.D. dependent var		0.067581
S.E. of regression	0.007950	Akaike info criterion		-6.542132
Sum squared resid	0.000379	Schwarz criterion		-6.421098
Log likelihood	36.71066	Hannan-Quinn criter.		-6.674906
F-statistic	214.7931	Durbin-Watson stat		2.418426
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber : E-views 12, data diolah

Dari data yang telah diperoleh maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{IDM = 0,058704 - 0,003332 DD + 0,026120 ADD - 0,000430 DAK}$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Nilai konstanta sebesar 0,058704 menunjukkan bahwa apabila variabel DD, ADD, dan DAK dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai IDM diperkirakan sebesar 0,058704. Koefisien regresi Dana Desa (DD) sebesar -0,003332 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Dana Desa sebesar satu satuan akan menurunkan IDM sebesar 0,003332, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 0,026120 menunjukkan bahwa setiap peningkatan ADD sebesar satu satuan akan meningkatkan IDM sebesar 0,026120. Sementara itu, koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,000430 menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAK sebesar satu satuan akan menurunkan IDM sebesar 0,000430, dengan asumsi variabel lain konstan.

Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Variabel Dana Desa (DD) memiliki koefisien negatif sebesar -0.003332 dengan nilai probabilitas 0.0009, yang berarti DD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IDM. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki koefisien positif sebesar 0.026120 dengan nilai probabilitas 0.0000, sehingga ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien negatif sebesar -

0.000430 dengan nilai probabilitas 0.0363, yang menunjukkan bahwa DAK juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IDM.

Selain itu, nilai R-squared sebesar 0.990775 menunjukkan bahwa sebesar 99,08% variasi Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan oleh variasi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan sisanya sebesar 0,92% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.986162 juga memperkuat bahwa model memiliki tingkat goodness of fit yang sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peningkatan dana memiliki pengaruh nyata terhadap pembangunan desa, arah pengaruh tersebut belum optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Aziz (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penggunaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, rendahnya kapasitas pengelolaan, serta dominasi pendekatan pembangunan yang bersifat top-down. Selain itu, tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah juga berpotensi menghambat kemandirian desa, sehingga berdampak negatif terhadap capaian IDM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas tata kelola, perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparatur desa agar dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif yang lebih optimal terhadap pembangunan desa.

4.1.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama dalam suatu model regresi. Nilai R^2 menggambarkan proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model.

Berdasarkan hasil estimasi model regresi yang telah dilakukan, diperoleh nilai R -squared sebesar 0,990775 atau sebesar 99,08%. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu menjelaskan variasi Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 99,08%.

Sedangkan sisanya sebesar 0,92% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam estimasi, seperti faktor sosial, ekonomi, kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, maupun kebijakan pembangunan lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus dalam menjelaskan variasi Indeks Desa Membangun sangat besar dan kuat, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini tergolong sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

4.1.2.5 Korelasi (R)

Koefisien korelasi digunakan untuk menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang -1 sampai +1. Apabila nilai mendekati -1

atau +1 maka hubungan antar variabel semakin kuat, sedangkan apabila mendekati 0 maka menunjukkan hubungan yang lemah.

Berdasarkan hasil regresi pada model penelitian ini diperoleh nilai R-squared sebesar 0,990775, sehingga nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,995. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) berada pada kategori hubungan yang sangat kuat (mendekati sempurna).

Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pada variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus sangat erat kaitannya dengan perubahan Indeks Desa Membangun. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjelaskan dinamika peningkatan IDM.

4.1.2.6 Konstanta dan Intersep

Nilai konstanta dalam model regresi sebesar 0,058704 yang bersifat positif menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen, yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai nol, maka nilai Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebesar 0,058704.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus, IDM tetap memiliki nilai dasar tertentu. Nilai tersebut mencerminkan adanya faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi tingkat perkembangan desa.

Konstanta yang bernilai positif juga mengindikasikan bahwa secara umum IDM tetap memiliki kecenderungan meningkat meskipun tidak sepenuhnya

bergantung pada variabel dana pemerintah. Oleh karena itu, selain faktor anggaran, terdapat faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, serta efektivitas kebijakan pembangunan yang turut berperan dalam menentukan tingkat kemajuan desa.

4.1.3 Uji Statistik

4.1.3.1 Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-t)

1) Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

a) Hipotesis

$H_0: \beta_1 = 0$: Tidak ada pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

$H_a: \beta_1 \neq 0$: Ada pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel Dana Desa (DD) secara parsial berkontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

b) Uji Statistik (uji t)

Rumus yang digunakan adalah:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Substitusi nilai koefisien regresi dan standar error variabel Dana Desa (DD):

$$t_{hitung} = \frac{-0,003332}{0,000552} = -6,034797$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar -6,034797. Nilai ini menunjukkan bahwa koefisien regresi Dana Desa memiliki arah negatif. Artinya, setiap peningkatan Dana Desa dalam model penelitian cenderung diikuti oleh penurunan nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Nilai t-statistik selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-tabel pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan derajat bebas:

$$(n - k - 1) = (10 - 3 - 1) = 6.$$

Sehingga diperoleh nilai $t_{\text{tabel}} = \pm 2,447$ (pendekatan umum).

c) Kriteria Uji

Tolak H_0 jika:

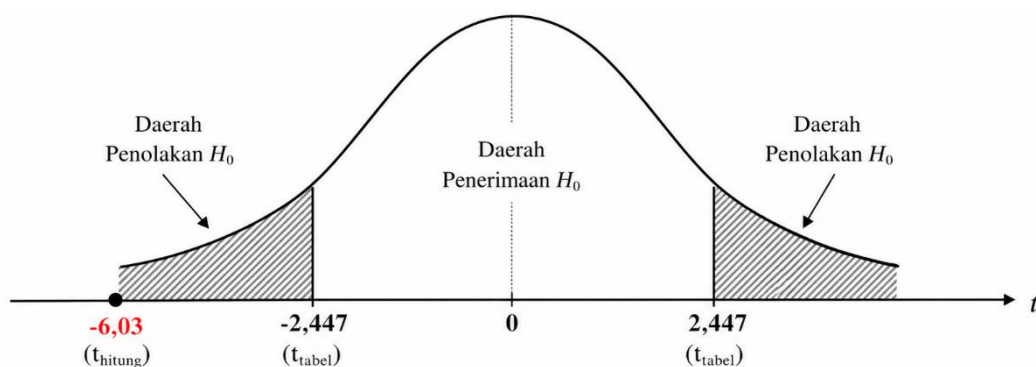
$$|t_{\text{hitung}}| > t_{\text{tabel}}$$

Karena:

$$|-6,034797| > 2,447$$

Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berikut disajikan kurva distribusi uji t untuk variabel Dana Desa (DD) yang menunjukkan posisi nilai t-hitung terhadap daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.



Gambar 4. 2 Kurva Dana Desa

Dalam distribusi normal, posisi t-hitung berada pada daerah penolakan H_0 sehingga hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IDM.

d) Kesimpulan

Variabel Dana Desa (DD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini juga diperkuat dengan nilai probabilitas sebesar $0,0009 < 0,05$. Artinya, peningkatan Dana Desa justru diikuti penurunan IDM dalam model ini.

2) Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

a) Hipotesis

$H_0: \beta_2 = 0$: Tidak ada pengaruh ADD terhadap IDM

$H_a: \beta_2 \neq 0$: Ada pengaruh ADD terhadap IDM

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi masing-masing variabel independen dalam model.

b) Uji Statistik (uji t)

Rumus yang digunakan adalah:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Substitusi nilai koefisien regresi dan standar error variabel ADD:

$$t_{hitung} = \frac{0,026120}{0,001459} = 17,90448$$

Nilai t-hitung sebesar 17,90448 menunjukkan bahwa koefisien regresi ADD memiliki arah positif. Hal ini berarti bahwa peningkatan Alokasi Dana Desa cenderung diikuti oleh peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai t-hitung kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar $\pm 2,447$.

c) Kriteria Uji

Tolak H_0 jika:

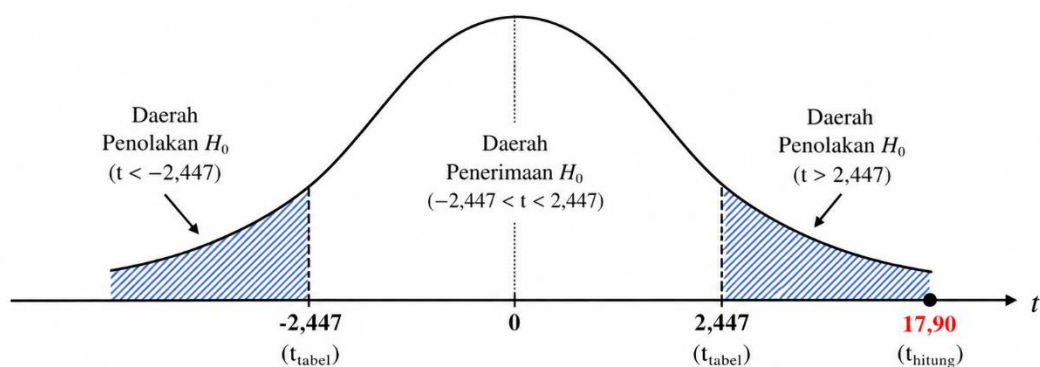
$$|t_{hitung}| > t_{tabel}$$

Karena:

$$17,90448 > 2,447$$

Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berikut disajikan kurva distribusi uji t untuk variabel Alokasi Dana Desa (ADD) yang menunjukkan posisi nilai t-hitung terhadap daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.



Gambar 4. 3 Kurva Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam distribusi normal, posisi t-hitung berada pada daerah penolakan H_0 sehingga hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IDM.

d) Kesimpulan

Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM, dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Artinya, peningkatan ADD akan meningkatkan IDM secara nyata.

3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Desa

Membangun (IDM)

a) Hipotesis

$H_0: \beta_3 = 0$: Tidak ada pengaruh DAK terhadap IDM

$H_a: \beta_3 \neq 0$: Ada pengaruh DAK terhadap IDM

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial memiliki pengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Pengujian dilakukan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5% untuk melihat signifikansi koefisien regresi variabel DAK dalam model penelitian.

b) Uji Statistik (uji t)

Rumus uji t yang digunakan adalah:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Substitusi nilai koefisien regresi dan standar error variabel DAK:

$$t_{hitung} = \frac{(-0,000430)}{0,000160} = -2,684669$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar -2,684669. Nilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Indeks Desa Membangun (IDM) bersifat berlawanan arah. Artinya, peningkatan DAK dalam model penelitian ini cenderung diikuti oleh penurunan IDM, dengan asumsi variabel lain tetap.

Nilai t-hitung kemudian dibandingkan dengan nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan:

$$df = n - k - 1$$

$$df = 10 - 3 - 1 = 6$$

Sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar $\pm 2,447$

c) Kriteria Uji

Tolak H_0 jika:

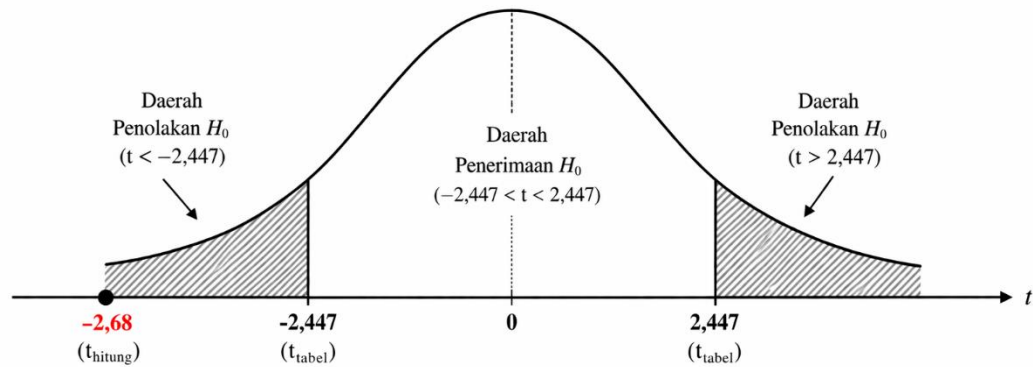
$$|t_{hitung}| > t_{tabel}$$

Karena:

$$|-2,684669| > 2,447$$

Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berikut disajikan kurva distribusi uji t untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menunjukkan posisi nilai t-hitung terhadap daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.



Gambar 4. 4 Kurva Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan kurva distribusi uji t tersebut, terlihat bahwa nilai t-hitung berada pada daerah penolakan H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Posisi t-hitung yang berada di luar batas t-tabel menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

d) Kesimpulan

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IDM dengan nilai probabilitas $0,0363 < 0,05$. Artinya, peningkatan DAK dalam model ini diikuti dengan penurunan IDM.

b. Pengujian Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian simultan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

1) Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian simultan menggunakan uji F, terlebih dahulu dirumuskan hipotesis penelitian sebagai dasar dalam menentukan keputusan statistik. Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Berikut hipotesis yang digunakan dalam pengujian simultan.

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ (Tidak ada pengaruh secara simultan)

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ (Ada pengaruh secara simultan)

2) Uji Statistik (Uji F)

Dalam penelitian ini, nilai F-hitung diperoleh melalui hasil regresi menggunakan aplikasi EViews. Selain itu, nilai F-hitung juga dapat dijelaskan melalui rumus uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Substitusi nilai ke dalam rumus:

$$F = \frac{0,990775/3}{(1-0,990775)/(10-3-1)} = \frac{0,330258}{0,001537} = 214,7931$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai F-hitung sebesar 214,7931. Nilai ini menunjukkan tingkat kemampuan model regresi dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Semakin besar nilai F-hitung, maka semakin kuat kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Selanjutnya, nilai F-hitung dibandingkan dengan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan:

$$df1 = k - 3$$

$$df2 = n - k - 1 = 6$$

3) Kriteria Uji

Tolak H_0 jika:

$$F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$$

Karena berdasarkan hasil pengujian diperoleh:

$$214,7931 > 4,76$$

Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4) Kesimpulan

Nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic})$ sebesar $0,000002 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel tersebut memiliki kontribusi yang sangat kuat dalam menjelaskan perubahan IDM selama periode penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia

Tahun 2015–2024

Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada periode 2015 hingga 2024 menunjukkan dinamika perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang disajikan, terlihat adanya pergeseran struktur status desa ke arah yang lebih baik. Pada awal periode, jumlah desa dengan kategori berkembang masih mendominasi, sementara desa mandiri dan maju relatif lebih sedikit. Namun, seiring berjalannya waktu, khususnya setelah tahun 2019, terjadi peningkatan yang cukup pesat pada jumlah desa mandiri yang naik dari 848 desa pada tahun 2019 menjadi 17.203 desa pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa di Indonesia.

Peningkatan jumlah desa mandiri tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama melalui program Dana Desa yang mulai diimplementasikan secara masif sejak tahun 2015. Kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan kapasitas desa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Selain itu, peningkatan desa maju yang mencapai lebih dari 23 ribu desa pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan yang cukup signifikan. Desa tertinggal menurun dari 17.633 desa pada tahun 2019 menjadi 6.100 desa pada tahun 2024, sementara desa sangat tertinggal juga mengalami penurunan dari 6.549 menjadi 4.363 desa. Penurunan ini

menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui berbagai program pembangunan desa.

Namun demikian, meskipun terdapat peningkatan pada desa mandiri dan maju, jumlah desa berkembang masih menjadi yang paling dominan sepanjang periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa proses transformasi pembangunan desa masih membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Dominasi desa berkembang mengindikasikan bahwa sebagian besar desa masih berada pada tahap transisi menuju kemandirian.

Secara keseluruhan, perkembangan IDM di Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan status desa ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, tantangan dalam pemerataan pembangunan dan percepatan peningkatan status desa masih perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan agar seluruh desa di Indonesia dapat mencapai status mandiri secara merata.

4.2.2 Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi

Khusus terhadap IDM

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan fiskal desa yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran penting dalam mempengaruhi perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia. Ketiga variabel tersebut merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan desa secara menyeluruh.

Dana Desa menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa. Peningkatan Dana Desa memberikan dampak positif terhadap

pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi di desa. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa investasi pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama dalam mendukung operasional pemerintahan desa dan pelayanan publik. Peningkatan ADD dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan program pembangunan desa menjadi lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai IDM.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan pola yang fluktuatif, namun tetap berkontribusi dalam pembangunan desa, khususnya melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DAK berperan sebagai pelengkap dari Dana Desa dan ADD dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Secara teoritis, hubungan antara kebijakan fiskal desa dan IDM dapat dijelaskan melalui pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan alokasi dana yang tepat sasaran akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian desa, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Namun demikian, efektivitas dari ketiga instrumen fiskal tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia di

tingkat desa. Tanpa pengelolaan yang baik, peningkatan alokasi dana tidak akan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan IDM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Indeks Desa Membangun di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dana, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara maksimal.

a. Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel Dana Desa (DD) menunjukkan arah yang positif, yang berarti variabel tersebut berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t statistik dan probability yang berada di bawah tingkat signifikansi α 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Dana Desa dengan IDM adalah positif dan signifikan. Oleh sebab itu, variabel Dana Desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM, maka hipotesis diterima.

Dana Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan desa di Indonesia. Dalam konteks ini, Dana Desa merupakan sumber pendanaan utama yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Koefisien positif yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap peningkatan Dana Desa akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai IDM.

Hubungan ini sejalan dengan teori pembangunan yang menyatakan bahwa peningkatan sumber daya pembangunan akan mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Dana Desa yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan kualitas infrastruktur desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Selain itu, Dana Desa juga memberikan dampak luas terhadap perkembangan desa, seperti meningkatnya akses terhadap fasilitas umum, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta percepatan perubahan status desa dari tertinggal menjadi berkembang, maju, hingga mandiri.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap IDM. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Dana Desa dengan Indeks Desa Membangun. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa melalui pengawasan yang lebih baik, transparansi pengelolaan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

b. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan arah yang positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai t tabel serta nilai probability yang lebih kecil dari α 5%. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Alokasi Dana Desa dengan IDM adalah positif dan signifikan, sehingga hipotesis diterima.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, ADD berperan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan ADD akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai IDM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dukungan dana yang diterima desa, maka semakin baik pula kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ADD juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, seperti pelayanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan tersebut, maka kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa juga akan semakin baik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan status IDM.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas keuangan desa melalui ADD dapat mendorong pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IDM. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan ADD yang efektif dan tepat sasaran agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan desa.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan arah yang positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t statistik dan probability yang memenuhi kriteria signifikansi. Dengan demikian, variabel DAK terbukti berpengaruh terhadap IDM, sehingga hipotesis diterima.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks pembangunan desa, DAK memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan DAK akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai IDM. Hal ini berarti bahwa semakin besar dukungan pembangunan yang diberikan melalui DAK, maka semakin meningkat pula kualitas pembangunan desa.

Selain itu, DAK juga memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti meningkatnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatnya konektivitas antarwilayah. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK memiliki peran dalam mendukung pembangunan desa, meskipun kontribusinya dapat berbeda dibandingkan dengan Dana Desa dan ADD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap IDM. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa alokasi DAK tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa agar dapat memberikan dampak yang optimal.

BAB 5

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

- 1) Pada IDM Indonesia periode 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju, meskipun mayoritas desa masih berada pada kategori Berkembang. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan desa berjalan positif, namun pemerataan antarwilayah masih menjadi tantangan utama.
- 2) Dana Desa (DD) terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan status IDM. Peningkatan alokasi dari Rp68 triliun (2022) menjadi Rp71 triliun (2024) mendukung pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran mampu mendorong desa naik kelas dari kategori Tertinggal menjadi Berkembang atau Mandiri.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) berperan penting dalam memperkuat kelembagaan desa dan operasional pemerintahan. Peningkatan ADD dari Rp34,7 triliun (2022) menjadi Rp38 triliun (2024) mendukung tata kelola desa yang lebih baik, sehingga memperkuat dimensi ketahanan sosial dalam IDM.
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, berkontribusi pada peningkatan akses infrastruktur dan layanan publik desa. Implementasi DAK fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, dan sanitasi terbukti meningkatkan dimensi ketahanan ekonomi dan sosial desa, sehingga mempercepat peningkatan status ID

- 5) Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi DD, ADD, dan DAK berpengaruh nyata terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun. Penurunan jumlah Desa Tertinggal dari 17.633 (2019) menjadi 6.100 (2024) menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan berbasis dana desa dalam memperkuat pembangunan lokal.

5.2 Saran

Untuk Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dalam pengelolaan DD, ADD, dan DAK agar alokasi dana benar-benar sesuai kebutuhan desa. Pendekatan berbasis data dan kondisi lokal harus menjadi prioritas. Untuk Pemerintah desa disarankan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan manajemen keuangan dan tata kelola.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana harus diperkuat agar efektivitas program pembangunan dapat terjamin. Untuk mempercepat transformasi desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri, perlu adanya diversifikasi program pembangunan. Fokus tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan BUMDes, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan. Dukungan investasi swasta dalam sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnurdiand, F. A., Firmansyah, R., Banjarnahor, R. B. S., P, I. W., & Utomo, D. A. (2024). Transformasi pembangunan desa di Indonesia: Melalui pendekatan top-down ke partisipatif dalam kerangka UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Medika Akademik*, 2(11).
- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). *Pengantar evaluasi program pendidikan*. Perdana Publishing.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Arsjad, M. F., Syukran, M., Tabo, S., Biongan, A., & Nuna, M. S. (2024). Implementasi PERMENDES PD TT Nomor 2 Tahun 2016 tentang indeks desa membangun. *Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 153–164.
- Aulia, N., Madani, M., & Tahir, N. (2023). Implementasi kebijakan indeks desa membangun (IDM) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, 4(4).
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi pembangunan desa dalam mewujudkan SDGs desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*.
- Bratanata, S. (2017). Analisis alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Dewi, P. S., & Aziz, A. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi dana desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Hafni, R. (2017). *Ekonomi pembangunan*. CV. Azka Pustaka.
- Hafni, R., & Arfandi, A. (2019). *Analisis ekonomi regional*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perihal pembangunan desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 245–266.

- Hidayati, R. A. (2021). Analisis potensi desa berbasis indeks pembangunan desa di wilayah pesisir Kabupaten Gresik. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 25–32.
- Ichsan, T. Al, Safuridar, & Syahputra, R. (2023). Systematic literature review: Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya pembangunan desa. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 162–168.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Laporan indeks desa membangun (IDM) nasional 2015–2024*. Jakarta.
- Logor, T., Kumenaung, A., & Walewangko, E. (2021). Strategi pengembangan ekonomi perdesaan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(4), 18–31.
- Malau, M., Damanik, D., Panjaitan, P., & Ekonomi, P. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Samosir. 6(1), 114–123.
- Muryawan, G. S., & Sukamdi. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*.
- Nugraha, A. S. (2023). Peran dana alokasi khusus (DAK) dalam pemerataan infrastruktur perdesaan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.
- Parnomo, A. Y. P., & Utami, S. S. (2024). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tahun 2019–2023. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 67–77.
- Purwadinata, S., Wafik, A. Z., & Harsono, I. (2024). Pemanfaatan dana desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dari perspektif keuangan daerah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(3), 1191–1196.
- Putri, A. A., Aryazeta, A. A., Fu'ad, Z., Ismikarimah, I., Devi, Y., & Kurniati, E. (2024). Teori-teori pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 182–192.
- Rahmah, N. A., Prawtiwi, L., & Rismayanti, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidangkasih di era pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 55–67.

- Rattu, R. A., & Tulusan, F. M. G. (2022). Pengaruh potensi ekonomi desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. VIII(123).
- Rezkie, L. S., & Yunani, A. (2023). Pengaruh dana desa dan pembangunan infrastruktur terhadap indeks desa membangun di Kecamatan Brabai. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 858–871.
- Sisilia, M., & Harsono. (2021). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70.
- Steve, J., Putong, S., Walewangko, E. N., Rorong, I. P., & Ratulangi, U. S. (2022). Analisis perbedaan indeks desa membangun di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews*. UPP STIM YKPN.